



LAPORAN KINERJA

2016



PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN 2017



"Terwujudnya Ternate menjadi Kota Berbudaya,
Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan
Berwawasan Lingkungan"

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016, disusun berpedoman pada Perjanjian Kinerja Walikota Ternate Tahun 2016. Laporan kinerja tersebut dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 adalah kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Walikota Ternate Tahun 2016. Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian sasaran Tahun 2016 yaitu sebesar **105,73%**.

Dari 11 (sebelas) sasaran pada perjanjian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016, semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85\%$. Capaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan nilai capaian 97,25%
2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik, nilai capaian 103,08%
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, nilai capaian 116,26%;
4. Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, nilai capaian 98,59%;
5. Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu, nilai capaian 100,00%;
6. Terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas

- pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat, nilai capaian , 87,95%;
7. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional, nilai capaian 105,52%;
 8. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas 90,17%;
 9. Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir, nilai capaian 145,96%;
 10. Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya, nilai capaian 118,23%; dan
 11. Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, nilai capaian 100,00%

Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran. Sebanyak 67 (enam puluh tujuh) atau 89,33% mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$ dan hanya 8 (delapan) atau 10,67% indikator sasaran nilai capaiannya kurang optimal $< 85,00\%$, yaitu:

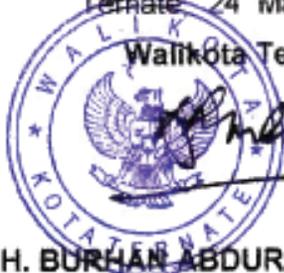
1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah nilai capaian rata-rata 68.69;
2. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk nilai capaian 70,00%;
3. Rasio bidan per 100.000 penduduk nilai capaian 82,00%;
4. Rasio Posyandu terhadap balita nilai capaian 72,29%;
5. Persentase kecamatan bebas rawan gizi nilai capaian 71,42%;
6. PNS yang memperoleh penghargaan dengan nilai capaian 63,74%;
7. Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan nilai capaian 83,78%; dan
8. Rasio bayi berakute kelahiran nilai capaiannya 62,75%.

Kelemahan tersebut di atas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ternate 24 Maret 2017
Walikota Ternate



Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF -----	i
DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR GAMBAR -----	v
DAFTAR TABEL -----	vi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. LATAR BELAKANG -----	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN -----	1
C. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE -----	2
D. ORGANISASI -----	5
E. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016 -----	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA -----	12
A. RENCANA STRATEGIS -----	12
a. Visi -----	12
b. Misi -----	15
c. Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah -----	19
d. Permasalahan dan Isu-Isu Pembangunan -----	25
e. Sasaran -----	35
f. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 -----	41
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 -----	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	49
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA -----	49
a. Penetapan Kategori Nilai Capaian -----	49
b. Pengukuran Kinerja -----	49
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA -----	58
C. TREND CAPAIAN KINERJA -----	86
D. REALISASI ANGGARAN -----	88
BAB IV PENUTUP -----	90
Lampiran	

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate -----	4
Gambar 3.1.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan di Luar Kawasan Perkotaan secara Berkeadilan 5 Tahun terakhir -----	60
Gambar 3.2.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 5 Tahun Terakhir -----	64
Gambar 3.3.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5 Tahun Terakhir -----	70
Gambar 3.4.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proportional dan Pro Rakyat 5 Tahun Terakhir -----	72
Gambar 3.5.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Tertatanya Infrastruktur Perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan Pemanfaatan Ruang Kota secara Terpadu 5 Tahun Terakhir ----	74
Gambar 3.6.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Good Government, dengan Sumber daya Aparatur yang Profesional Kreatif, Inovatif yang mampu menjamin Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Kemandirian Masyarakat 5 Tahun Terakhir -----	76
Gambar 3.7.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh, Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Tradisional 5 Tahun Terakhir -----	78
Gambar 3.8.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah, Murah, Nyaman dan Berkualitas 5 Tahun Terakhir -----	80
Gambar 3.9.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pesisir 5 Tahun Terakhir -----	82
Gambar 3.10.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Tertanganinya Permasalahan Menurunya Kesadaran Spiritualitas Keberagaman Permasalahan Sosial, Budaya 5 tahun Terakhir -----	84
Gambar 3.11.	Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran Tertanganinya Masalah Penegakan dan Kepastian Hukum di Daerah 5 Tahun Terakhi --	85
Gambar 3.12.	Grafik Trend Rata-Rata Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir-----	88

DaftarTabel

Tabel	2.1.	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	35
Tabel	2.2.	Indikator Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	41
Tabel	2.3.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	43
Tabel	3.1.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Ternate Tahun 2016 -----	50
Tabel	3.2.	Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	52
Tabel	3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	52
Tabel	3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 Pemerintah Kota Kota Ternate Tahun 2016 -----	59
Tabel	3.5.	Trend Capaian Kinerja Sasaran 1 pada 5 Tahun Terakhir -----	59
Tabel	3.6.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	60
Tabel	3.7.	Trend Capaian Sasaran 2 pada 5 Tahun Terakhir -----	63
Tabel	3.8.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	65
Tabel	3.9.	Trend Capaian Sasaran 3 pada 5 Tahun Terakhir -----	70
Tabel	3.10.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	71
Tabel	3.11.	Trend Capaian Sasaran 4 pada 5 Tahun Terakhir -----	72
Tabel	3.12.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	73
Tabel	3.13.	Trend Capaian Sasaran 5 pada 5 Tahun Terakhir -----	73
Tabel	3.14.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	74
Tabel	3.15.	Trend Capaian Sasaran 6 pada 5 Tahun Terakhir -----	75
Tabel	3.16.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	76
Tabel	3.17.	Trend Capaian Sasaran 7 pada 5 Tahun Terakhir -----	78
Tabel	3.18.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	79
Tabel	3.19.	Trend Capaian Sasaran 8 pada 5 Tahun Terakhir -----	80
Tabel	3.20.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	81
Tabel	3.21.	Trend Capaian Sasaran 9 pada 5 Tahun Terakhir -----	81
Tabel	3.22.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	82
Tabel	3.23.	Trend Capaian Sasaran 10 pada 5 Tahun Terakhir -----	83
Tabel	3.24.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	84
Tabel	3.25.	Trend Capaian Sasaran 11 pada 5 Tahun Terakhir -----	85
Tabel	3.26.	Trend Capaian Sasaran Pemerintah Kota Ternate Pada 5 Tahun Terakhir -----	86
Tabel	3.27.	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 -----	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap penyelenggara pemerintahan membuat laporan kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah melalui Laporan Kinerja yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Ternate dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Ternate kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Ternate

C. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu. Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel 1.1

Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Ternate Utara	14
2	Ternate Tengah	15
3	Ternate Selatan	17
4	Pulau Ternate	13
5	M o t i	6
6	Hiri	6
7	Batang Dua	6
Jumlah		77

b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,03 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

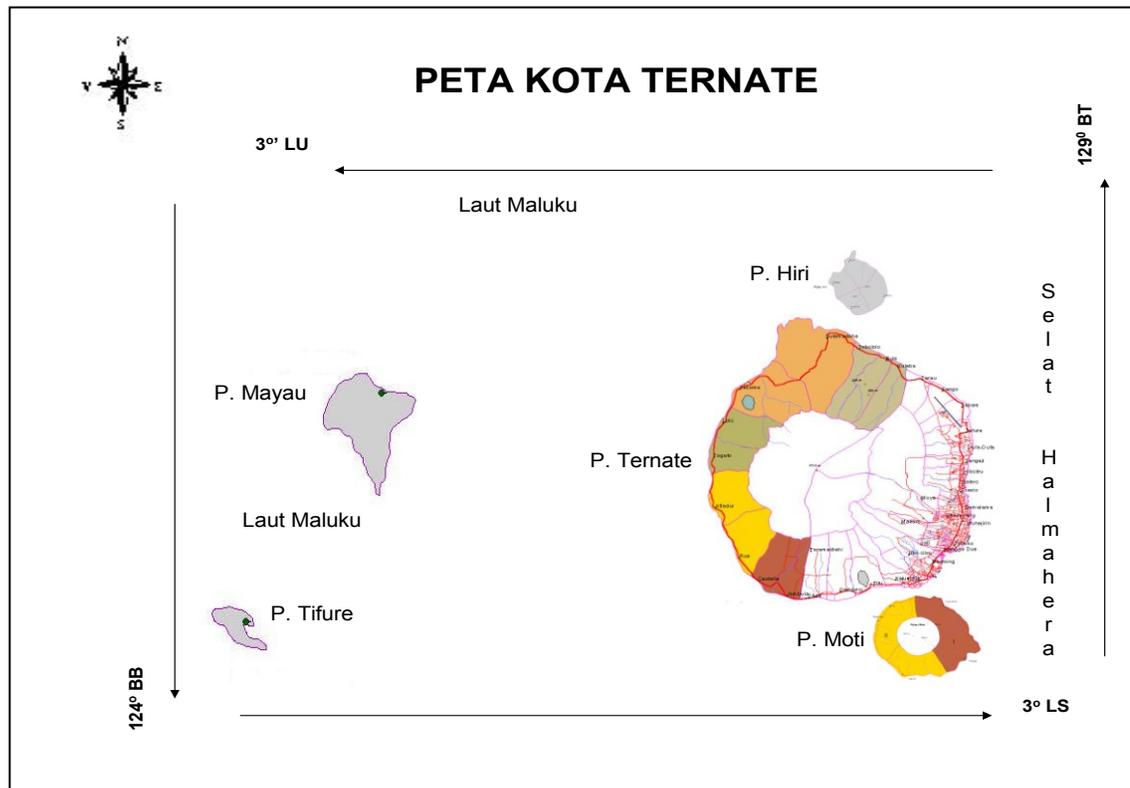
- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Maka
7. Pulau Mano
8. Pulau Gurida

Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate



c. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

1. *Rogusal*: - Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti

2. *Rensika*: - Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

e. Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2015 sebanyak 212.997 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan Ternate Selatan 73.263 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 52.134 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 60.312 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 16.553 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 4.909 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.762 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 3.064 jiwa.

D. ORGANISASI

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor:11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, sampai dengan akhir tahun 2016 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) 23 (dua puluh tiga) organisasi Dinas Daerah;
- 4) 6 (enam) organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 2 (dua) Perusahaan Daerah;
- 7) 8 (delapan) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 8) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

E. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Prioritas Pembangunan Kota Ternate tahun 2016 diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor:15Tahun 2015Tanggal 7 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2016. Rencana kerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 merupakan rencana program/kegiatan transisi dalam RPJMD Kota Ternate.Program Prioritas Pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan dan penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada Kecamatan-Kecamatan di luar kawasan perkotaan.
 - b. Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada Kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan batang Dua).
 - c. Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya.

- 2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki Sarana Pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan.
 - b. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa.
 - d. Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1.
 - e. Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.
 - f. Memberikan Beasiswa kepada Guru Berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.

- g. Memberikan Insentif kepada Guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Perbaiki Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan dokter dan Tenaga Keperawatan, serta Obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan insentif kepada Bidan Desa atau tenaga Kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
- c. Memberikan Beasiswa kepada Dokter, Tenaga Medis Putra/Putri Daerah Berprestasi terutama dari Keluarga Kurang Mampu untuk melanjutkan ke jenjang Spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
- d. Pelayanan Jamkeda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki.
- e. Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap Kelas III.
- f. Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu.

4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan *One Village One Program* (Satu Kelurahan, Satu Program Unggulan), yang didahului dengan penguatan kapasitas Aparatur, pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan.
- b. Membangun Rumah layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).
- c. Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus pemerintah daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).

- d. Santunan Kematian Warga Kurang Mampu.
 - e. Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya.
 - f. Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat.
 - g. Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap *One Village One Program*.
- 5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:**
- a. Penataan kawasan Pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal.
 - b. Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai Pasar Tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah.
 - c. Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.
 - d. Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat.
 - e. Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya.
 - f. Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai kota pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
 - g. Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.
- 6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawah, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif, dan Responsif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:**
- a. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

- b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.
- c. Mengubah *mainset* aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Menyelenggarakan prinsip *reward and punishman* untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan.
- e. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan.
- f. Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.

7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu.
- b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor.
- c. Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar.
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota.
- e. Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan dan Kelompok Pemuda.
- f. Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka *unskill*, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.

8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Membentuk lembaga perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.
- c. Menyediakan Database Kependudukan Online.
- d. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.
- b. Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.
- c. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
- d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi.
- b. Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur'an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sekaligus memberikan pemahaman tentang Syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
- c. Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Ummat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya.

- d. Membina Kerukunan antar Ummat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuasa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, Dokumen Sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.
- e. Menjamin kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat.
- f. Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate.

11. Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azazi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
- b. Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
- d. Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
- e. Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannya.
- f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA, AGAMAI, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**.

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

1. **Kalimat Terwujudnya**, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Ternate mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan. Bahwa sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta partisipasi dan dukungan/ dorongan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata 'bekerja' sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintah 5 (lima) tahun mendatang, serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu membahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja di bawah kendali kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate akan tercapai secara optimal.

2. **Kalimat Berbudaya**, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat *se atoran* sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat *se atoran* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
3. **Kalimat Agamais**, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.
4. **Kalimat Harmonis**, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representative bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
5. **Kalimat Mandiri**, dalam kamus bahasa Indonesia, kata Mandiri dapat mengandung beberapa pengertian, yaitu Pertama, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/ kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Kedua, kata

mandiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan situasinya, tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dengan demikian maka Mandiri dapat diartikan, bahwa seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Ketiga, kata mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Segangkan Makna **Keempat**, kata mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi di artikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

6. **Kalimat Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).
7. **Kalimat Berwawasan Lingkungan**, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang **seluruh** arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial

budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman dan sehat melalui penataan memberi ketenangan, nyaman dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *water front city*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

b. Misi

Secara umum, Misi dapat di rumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat di pandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang mandiri Adil dan Sejahtera

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan antara lain membuka keterisolasian, membuka berbagai jaringan sampai ke pelosok-pelosok daerah, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, membangun dan mengembangkan berbagai jaringan infrastruktur, membangun sektor pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membangun berbagai fasilitas kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat, serta mengurangi balita kurang gizi, terutama mereka yang tinggal di Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua. Jika tujuan-tujuan ini berhasil, maka peringkat daya singkat Kota Ternate akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan mengundang investor untuk berinvestasi ke Kota Ternate.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, di antaranya kendala geografi, kendala transparansi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya. Oleh karena itu, agenda kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan dalam upaya memecahkan berbagai kendala dimaksud. Jika kendala tersebut dapat di atasi, maka pembangunan yang dilaksanakan dimasa mendatang akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata dan adil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais

Pendekatan pembangunan daerah yang semata-mata mengejar capaian target pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah saja tanpa mempertimbangkan pendekatan sosial budaya, kadang tidak dapat mencapai target utama dari pembangunan daerah itu sendiri, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Untuk melakukan sebuah perubahan, perlu ada pembangunan diberbagai sektor. Namun pembangunan itu sendiri tidak harus menjauhkan masyarakat dari budaya yang turun temurun telah hidup dimasyarakat dan diyakini sebagai sebuah nilai sosial yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun tahun 2016-2021 disamping dilakukan melalui beberapa pendekatan dan inovasi baru, juga dalam rangka melanjutkan berbagai target yang belum dapat dicapai secara maksimal di periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Pendekatan inovasi baru dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah pembangunan yang berdimensi pada upaya pelestarian budaya lokal dan kearifan lokal, serta pendekatan yang berdimensi religius yaitu pembangunan daerah yang berdimensi agamais. Pembangunan daerah melalui pendekatan agamais, hakekatnya adalah pembangunan daerah yang dilakukan tidak semata-mata dalam upaya mencapai kenikmatan dan kesejahteraan dunia

semata, tetapi pembangunan yang bersendikan pada aqidah agama dalam upaya pencapaian kebahagiaan akherat kelak.

Pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan budaya dan agamais, diharapkan akan dapat merubah karakter para penyelenggara pembangunan itu sendiri untuk bekerja dengan penuh kesungguhan dan dengan kejujuran, sehingga pada akhirnya akan terbangun suatu budaya kerja yang agamais, yakni birokrasi yang dalam melaksanakan pekerjaannya : (i) Tidak KKN; (ii) Tidak ada pelanggaran hukum; (iii) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; (iv) perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overla*; (v) komunikasi dengan publik berjalan baik; (iv) penggunaan anggaran efisien dan efektif; (vii) produktifitas meningkatkan kuantitas dan kualitasnya; dan (viii) hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan Infrastruktur jasa dan Perdagangan yang Merata antar Wilayah Perkotaan

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya unvestor untuk berinvestasi di Kota Ternate. Jika sampai dengan akhir periode pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu, pembangunan berbagai infrastruktur masi belum dapat memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang berdomisili di wilayah terisolir dan terbelakang dan tertinggal dan terpencil, sehingga berbagai potensi unggulan disetiap wilayah belum dapat dikelola secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ditingkatkan dan disebar secara merata, adil dan proposional.

Tersebar nya infrastruktur secara merata keseluruhan wilayah di Kota Ternate secara proporsional, diharapkan akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya. Tersebar nya secara merata dan proporsional infrastruktur, di harapkan

akan menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan publik seperti: penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan mengurangi terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah, serta antar wilayah perkotaan itu sendiri.

4. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim

Kota Ternate, secara geografi kewilayahannya merupakan kota yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan fokus pada pembangunan bernuansa pesisir dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan poros maritim dunia. Kota Ternate sebagai salah satu kota maritim yang berada di ujung timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan agenda besar pembangunan poros maritim dunia.

Jika dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Ternate belum secara maksimal mengkonsentrasikan berbagai sumber daya untuk pembangunan pesisir dan maritim, maka dimasa mendatang pembangunan terkait dengan pesisir dalam rangka membangun sinergi dengan pembangunan tol laut dan poros maritim sebagai telah ditetapkan sebagai sasaran prioritas nasional, akan lebih dioptimalkan. Dengan konsep pendekatan pembangunan tersebut diharapkan akan memberi dampak positif terhadap percepatan pembangunan Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus memberi dampak ganda terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten/ kota lainnya di lingkup Provinsi Maluku Utara.

5. Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya sejarah dan bahari

Kota Ternate yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi perairan, belum secara optimal mengelola potensi unggulan perairan sebagai salah satu produk unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomis yang tinggi. Dengan karakteristik demikian, maka pengelolaan potensi unggulan perairan berbasis wisata bahari, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah yang signifikan untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Demikian pula potensi kekayaan dan keragaman budaya yang ada di kota ternate yang

selama ini belum dioptimalkan dalam pengelolaannya dalam menambah pendapatan asli daerah, perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan, bahwa tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Ternate dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Ternate terkait dengan pernyataan misi untuk kurun waktu pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Membangun Ternate Yang Mandiri, Adil dan Sejahtera

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu 'Membangun Ternate yang mandiri, adil dan sejahtera', maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;

- b. Merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang pelayanan sosial dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat di bidang perekonomian dan usaha kecil menengah masyarakat lokal dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. Mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.
 - f. Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;
 - b) Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Memfasilitasi tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
 - e) Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar wilayah perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.
- 2. Misi 2 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais**
- Untuk mencapai target Misi 2 yaitu 'Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais', maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:
- a. Menata kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, serta sebagai kota yang agamais;

- b. Melindungi berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c. Menjaga dan mempertahankan predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah; dan
- e. Membangun berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tertatanya kembali Kota Ternate Sebagai kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais;
- b) Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c) Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah;
- e) Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

3. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata antar Wilayah Perkotaan

Untuk mencapai target Misi 3 Yaitu 'Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata antar Wilayah Perkotaan' maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan;
- c. Meningkatkan aktivitas perekonomian, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil menengah masyarakat lokal;

- d. Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e. Menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka penangguran dan angka kriminalitas serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate maka rumusan sasaran di tetapkan sebagai berikut:

- a) Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b) Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan;
- c) Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil menengah masyarakat lokal;
- d) Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e) Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha di kalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

4. Misi 4 : Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim

Untuk mencapai target Misi 4 Yaitu 'Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim' maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c. Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;

- d. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f. Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- g. Merumuskan kembali kebijakan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

Berdasarkan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut di atas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a) Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c) Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- d) Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f) Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- g) Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

5. Misi 5 : Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari

Untuk mencapai target Misi 5 Yaitu 'Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari' maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menciptakan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- b. Mempromosikan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate;
- f. Meningkatkan daya saing pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut di atas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- b. Terpromosikannya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate;
- f. Meningkatkan daya saing pemerintah Kota Ternate di bidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

d. Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2016-2020 adalah:

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
- b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.
- c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.
- d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
- e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
- f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
- g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh Walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh Walikota.

2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a) Tidak seimbang pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.
- d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

- a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.

- e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integrative*.
- f) Terbaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
- g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- b) Penataan *drainase* dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
- c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

- a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
- b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- c) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya

angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.

- d) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- e) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- f) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atorang* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- g) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- h) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- i) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

6. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal

(investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

7. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kota Ternate bertekad akan menggali secara maksimal berbagai potensi pendapatan asli daerah yang selama ini belum dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien, adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Masih belum tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel.
- b. Belum terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, yang dapat dimaknai pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah.
- c. Belum terselenggaranya pemerintahan yang diorientasikan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Ternate dan umumnya masyarakat Provinsi Maluku Utara.

9. Permasalahan Pembangunan Berbasis Kepulauan yang Berkelanjutan

Kota Ternate yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara secara geografis masuk kedalam rumpun daerah kepulauan dimana wilayahnya

sebagian besar berupa pulau/kepulauan yang dikelilingi oleh perairan (laut). Dengan karakteristik wilayah yang demikian, maka porsi program dan pagu anggaran untuk mempercepat pembangunan di wilayah pulau/kepulauan dalam ukuran waktu 5 (lima) tahun kedepan akan diberi porsi yang lebih besar dibandingkan pembangunan di wilayah daratan.

Berdekatan pembangunan berkelanjutan telah secara tegas di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan berdimensi kepulauan, maka pembangunan pada wilayah pulau-pulau terpencil, terbelakang dan terisolir yang relatif belum dapat tersentuh secara maksimal pada 5 (lima) tahun yang lalu, dalam pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan di dorong untuk mendapatkan porsi pembangunan berbagai infrastruktur yang memadai, sehingga pada akhir periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu tahun 2021 telah dapat sejajar dengan wilayah lainnya di Kota Ternate. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah pulau/kepulauan terpencil/tertinggal/terbelakang perlu secara konsistensi mengedepankan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam tetap dapat terjaga kuantitas dan kualitasnya.

10. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Manusia

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) masih kurangnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai kebutuhan; (ii) rendahnya angka partisipasi sekolah baik pada tingkat dasar dan menengah, utamanya pada tingkat pendidikan tinggi; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang

ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkorelasi secara signifikan terhadap angka pengangguran, tumbuhnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna narkoba, pengemis dan gelandangan).

b. Sumber Daya Alam

Dari hasil telaah dan dianalisis terhadap data dan informasi yang ada telah memberi informasi, bahwa Kota Ternate memiliki potensi keanekaragaman sumber daya perairan, hutan dan laut yang belum dikelola secara terintegrasi menjadi bagian integral dalam mewujudkan daya saing daerah Kota Ternate.

Kota Ternate sebagai daerah kepulauan dan wilayah pesisir yang panjang memiliki karakteristik yang menonjol yaitu : Tangkapan air yang terbatas dan sumber daya/cadangan air tawar yang sangat rendah, peka dan rentan terhadap tekanan (*stressor*) dari pengaruh eksternal baik alami maupun kegiatan manusia memiliki sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman hayati yang tipikal dan bernilai tinggi.

11. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Daerah adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masi besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan

masyarakat (belanja langsung). Sementara itu terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

12. Permasalahan Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti DPRD, perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

13. Permasalahan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha

Seiring semakin transparannya pengelolaan keuangan daerah pada satu sisi. Pada sisi lain kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah yang bersangkutan, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara kongkrit, masih ditemui berbagai kendala. Dengan demikian, kesepakatan dan kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati oleh berbagai pihak, berhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

14. Permasalahan Sinergitas antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga DPRD

Implementasi kerjasama (kesepakatan) antara perangkat daerah dengan DPRD masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan sektor, lintas sektor maupun kewilayahan termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan, belum dapat diwujudkan secara maksimal. Demikian juga kerjasama dengan DPRD

pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan, sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan berbasis kinerja dapat diwujudkan.

15. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan karena belum semua perangkat daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara periodik, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal, pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda Non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

16. Permasalahan Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan kelurahan agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

17. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yg di prediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparaturnya yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penataan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana, masi perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

18. Permasalahan Terkait Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditegaskan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan tugas Bappeda yang semakin berat namun strategis dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tentu membawa konsekuensi logis, yaitu semakin strategis dan beratnya tugas dan fungsi badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengawal untuk menjamin kualitasnya dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

Intinya dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, maka Bappeda dapat dituntut dapat berperan untuk mengharmonisasikan berbagai target program, indikator sarana kinerja baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah yang telah ditetapkan antara dokumen perencanaan Kota dengan Provinsi dan antara Kota dengan target pembangunan prioritas nasional.

e. Sasaran

Sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2
Tujuan 1: Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada wilayah kecamatan	
<p>Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah Kecamatan di luar perkotaan 2) Persentase Kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih 3) Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN
Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas	
<p>Sasaran strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks Pembangunan Manusia 2) Angka melek huruf seluruh penduduk 3) Nilai UN dan UAS rata-rata - Nilai UN rata-rata SD

<p>tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik</p>	<ul style="list-style-type: none">- Nilai UAS rata-rata SD- Nilai UN rata-rata SLTP- Nilai UAS rata-rata SLTP- Nilai UN rata-rata SLTA- Nilai UAS rata-rata SLTA- Nilai UN rata-rata paket B- Nilai UAS rata-rata paket B- Nilai UN rata-rata paket C- Nilai UAS rata-rata paket C <p>4) Angka kelulusan</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP- SLTA <p>5) Angka putus sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP- SLTA <p>6) Angka rata-rata lama sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP- SLTA <p>7) Angka partisipasi murni</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP- SLTA <p>8) Angka partisipasi kasar</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP- SLTA <p>9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- SD- SLTP
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA
<p>Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas</p>	
<p>Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit <ul style="list-style-type: none"> - Malaria - TBC - DBD - HIV 3) Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) <ul style="list-style-type: none"> - Karena penyakit Malaria - Karena penyakit TBC - Karena penyakit DBD - Karena penyakit HIV 4) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA 5) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 6) Angka kematian balita 7) Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

	<ul style="list-style-type: none"> 8) Persentase balita gizi buruk 9) Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 10) Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 11) Rasio bidan per 100.000 penduduk 12) Rasio perawat per 100.000 penduduk 13) Rasio Posyandu terhadap balita 14) Rasio Puskesmas per satuan penduduk 15) Rasio Pustu per satuan penduduk 16) Persentase kecamatan bebas rawan gizi 17) Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam 18) Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 19) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan 20) Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk <ul style="list-style-type: none"> - Annual Malaria Incidence (AMI) - Annual Parasite Incidence (API)
Tujuan 4: Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat	
<p>Sasaran strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rasio belanja langsung terhadap total belanja 2) Rasio belanja modal terhadap total belanja 3) Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan 4) Persentase peningkatan dana pembangunan Kelurahan

	<p>5) Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan <p>6) Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda</p> <p>7) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikasi tanah</p>
<p>Tujuan 5: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis</p>	
<p>Sasaran strategis 5:</p> <p>Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu</p>	<p>1) Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata</p> <p>2) Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan</p> <p>3) Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan</p>
<p>Tujuan 6: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.</p>	
<p>Sasaran strategis 6:</p> <p>Terwujudnya <i>good government</i>, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat</p>	<p>1) Persentase PNS yang memperoleh penghargaan</p> <p>2) Persentase PNS yang diberikan sanksi berat</p> <p>3) Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu</p> <p>4) Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK</p>

Tujuan 7: Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	
<p>Sasaran strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai modal kerja dan investasi UKM 2) Nilai omzet UKM 3) Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan 4) Tingkat pengangguran terbuka 5) Pendapatan perkapita 6) Laju pertumbuhan ekonomi 7) Tingkat Inflasi
Tujuan 8: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah	
<p>Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP 2) Jumlah layanan perizinan bebas biaya 3) Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai 4) Rasio penduduk ber-KTP 5) Rasio penduduk ber-KK 6) Rasio bayi ber-akte kelahiran
Tujuan 9: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah	
<p>Sasaran strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan 2) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan
Tujuan 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	
<p>Sasaran strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran 2) Jumlah Taman Pengajian Al-Quran 3) Jumlah pertemuan forum antar umat beragama

	<p>4) Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan</p> <p>5) Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate</p> <p>6) Persentase situs budaya yang dilestarikan</p>
Tujuan 11: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif	
<p>Sasaran strategis 11:</p> <p>Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah</p>	<p>1) Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan</p> <p>2) Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan</p> <p>3) Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani</p>

f. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 adalah:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama		Target	Satuan
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12.60	%
2	Persentase kelurahan padakawasa datar anti nggi yang terlayani air bersih	100.00	%
3	Angka kelulusan SD, SLTP, SLTA	100.00	%
4	Angka Putus Sekolah SD, SLTP, SLTA	0.07	
5	Angka partisipasi murni SD, SLTP, SLTA	80.66	%
6	Angka partisipasi kasar SD, SLTP, SLTA	83.07	%
7	Angka usia harapan hidup	71	Tahun
8	Angka prevalensi penyakit - Malaria	< 10	‰

	- TBC	225/100.000	Pddk
	- DBD	3	‰
	- HIV	0,5/1.000	Pddk
9	Angkakematian kasar (per 1000 Penduduk)		
	- Malaria	<5 per 100.000	Pddk
	- TBC	< 2 per 100.000	Pddk
	- DBD	< 2 per 100.000	Pddk
	- HIV	<5 per 100.000	Pddk
10	Angkakematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000	KH
11	Angkakematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000	KH
12	Persentase balita gizi buruk	2.00	%
13	<i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	< 10	‰
14	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00	%
15	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50.00	%
16	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40.36	%
17	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45.00	%
18	Tingkat pengangguran terbuka	6.50	%
19	Pendapatan perkapita	33,534,337,00	Rp
20	Laju pertumbuhan ekonomi	8.10	%
21	Tingkat Inflasi	4.51	%
22	Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8	
23	Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,9	
24	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang telah memiliki SOP	100.00	%
25	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30	Klp.
26	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2	Kali
27	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00	%
28	Jumlah peraturan daerah yang diterbitkan	8	Perda
29	Persentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00	%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tahun 2016 adalah masa transisi RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara araberkeadilan	1 Persentase panjang jalanan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12.60 %
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00 %
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	75.00 %
Sasaran strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau serta sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	82.00 %
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata	
	- Nilai UN rata-rata SD	6.00
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50
	- Nilai UN rata-rata SLTP	6.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	6.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5.00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6.50
	- Nilai UN rata-rata paket C	5.00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7.00
4 Angka kelulusan		
- SD	100.00 %	
- SLTP	100.00 %	
- SLTA	100.00 %	

	5 Angka putus sekolah	
	- SD	0.06 %
	- SLTP	0.07 %
	- SLTA	0.09 %
	6 Angka rata-rata lama sekolah	
	- SD	6 Tahun
	- SLTP	3 Tahun
	- SLTA	3 Tahun
	7 Angka partisipasi murni	
	- SD	92.00 %
	- SLTP	75.00 %
	- SLTA	75.00 %
	8 Angka partisipasi kasar	
	- SD	99.21 %
	- SLTP	75.00 %
	- SLTA	75.00 %
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	
	- SD	1 : 175 %
	- SLTP	1 : 182 %
	- SLTA	1 : 275 %
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 30
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 29
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 18
	14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 15
	15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 15
Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	71 Tahun
	2 Angka prevalensi penyakit	
	- Malaria	< 10 %
	- TBC	225/100.000 Pddk

	- DBD	3.00 ‰
	- HIV	0,5/1.000 Pddk
3	Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)	
	- Karena penyakit Malaria	<5 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit TBC	<2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk
4	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	65.00 ‰
5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH
6	Angka kematian balita	5/1.000 KH
7	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000 KH
8	Persentase balita gizi buruk	2.00 ‰
9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk
10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk
11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : 100.000 Pddk
12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk
13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60 Balita
14	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk
15	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk
16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00 ‰
17	Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00 ‰

	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00 %
	20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk	
	- <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI)	20.00 ‰
	- <i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	< 10 ‰
Sasaran strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50.00 %
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	20.00 %
	3 Persentase realisasi dan partisipasi kecamatan	100.00 %
	4 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	20.00 %
	5 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan	
	- MCK Komunal	51.61 %
	- Drainase /gorong-gorong	14.45 %
	- Jalan lingkungan	17.97 %
	6 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100.00 %
	7 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK
Sasaran strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	5 Lokasi
	2 Persentase setaman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	73.05 %
	3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40.36 %

Sasaran strategis 6: Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	2.92 %
	2 Persentase PNS yang diberikansanksiberat	0.08 %
	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00 %
	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45.00 %
Sasaran strategis 7: Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usahamikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1 Nilai modal kerjadan investasi UKM	1,018,469,557,942.00 Rp
	2 Nilai omzet UKM	2,690,568,153,097.00 Rp
	3 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	37 Klp.
	4 Tingkat pengangguran terbuka	6.50 %
	5 Pendapatan perkapita	33,534,337.00 Rp
	6 Laju pertumbuhan ekonomi	8.10 %
	7 Tingkat Inflasi	4.51 %
Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	100.000 %
	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	35 Jenis
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	12 Tempat
	4 Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8
	5 Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,9
	6 Rasio bayi ber-aktekelahiran	1 : 0,7
Sasaran strategis 9: Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	71 Klp.
	2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30 Klp.

Sasaran strategis 10: Tertanganinyapermasalah anmenurunnyakesadaran spiritualitaskeberagamaan , permasalahan sosial, danbudaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00 %
	2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	100 TPQ
	3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali
	4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	43 Orang
	5 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	10.00 %
	6 Persentasesitusbudaya yang dilestarikan	40.00 %
Sasaran strategis 11: Tertanganinyamasalahpe negakandankepastianhuk um di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda
	2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100.00 %
	3 Persentase Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidak-berhasilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan strategi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Ternate kedepan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 menggambarkan tingkat kinerja pencapaian sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 pada formulir pengukuran kinerja terlampir, nilai capaian masing-masing indikator kinerja utama berkisar antara 88,09% sampai dengan 170,00%. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12.60%	11.56%	91.75
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00%	100.00%	100.00
3	Angka kelulusan SD, SLTP, SLTA	100.00%	100.00%	100.00
4	Angka Putus Sekolah SD, SLTP, SLTA	0.07%	0.07 %	100.00
5	Angka partisipasi murni SD, SLTP, SLTA	80.66%	78.02%	96.72
6	Angka partisipasi kasar SD, SLTP, SLTA	83.07 %	87.84%	105.74
7	Angka usia harapan hidup	71 Tahun	70 Tahun	98.59
8	Angka prevalensi penyakit			
	- Malaria	< 10‰	5.2‰	147.47
	- TBC	225/100.000 Pddk	219/100.000 Pddk	102.67
	- DBD	3‰	0.06 ‰	180.00
	- HIV	0,5/1.000 Pddk	0,03/1.000 Pddk	194.00
9	Angka kematian kasar (per 1000 Penduduk)			
	- Malaria	< 5 per 100.000 Pddk	0 per 100.000 Pddk	200.00
	- TBC	< 2 per 100.000 Pddk	1,6 per 100.000 Pddk	115.79
	- DBD	< 2 per 100.000 Pddk	3,4 per 100.000 Pddk	55.88
	- HIV	< 5 per 100.000 Pddk	1 per 100.000 Pddk	179.59
10	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	5,8/1.000 KH	117.14
11	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000 KH	122/100.000 KH	112.86
12	Persentase balita gizi buruk	2.00%	0.6%	170.00
13	<i>Annual Parasite Incidence (API)</i>	< 10‰	5.20‰	148.00
14	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan Kesehatan	100.00%	100.00%	100.00
15	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50.00%	50.13%	100.25
16	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40.36%	40.36%	100.00
17	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45.00%	39.64%	88.07
18	Tingkat pengangguran terbuka	6.50%	--	-

19	Pendapatan perkapita	Rp33,534,337,00	Rp35,151,093.00	104.82
20	Laju pertumbuhan ekonomi	8.10%	8.12%	100.25
21	Tingkat Inflasi	4.51%	1.91%	157.65
22	Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8	1 : 0,78	97.44
23	Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,9	1 : 0,88	97.73
24	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang telah memiliki SOP	100.00%	100.00%	100.00
25	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30 Klp.	58 Klp.	193.33
26	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100.00
27	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00%	88.99%	88.99
28	Jumlah peraturan daerah yang diterbitkan	8 Perda	8 Perda	100.00
29	Persentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00%	100.00%	100.00

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 28 (dua puluh delapan) mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$ dan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu tingkat pengangguran terbuka tidak dapat dilakukan pengukuran disebabkan pada tahun 2016 BPS tidak merilis angka TPT pada level Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan sampel survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) akibat penghematan anggaran Kementerian/Lembaga. sementara, angka TPT yang disajikan BPS di tahun 2016 hanya sampai pada level provinsi.

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, diuraikan pada Analisa Capaian Kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate tahun 2016.

2) Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berkisar antara 62,75% sampai dengan 193,33% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Ternate
Tahun 2016**

No	Capaian Kinerja Indikator Sasaran	Predikat	Jumlah
1	85 sampai dengan 100%	Sangat berhasil	67
2	70 s/d kurang dari 85%	Berhasil	5
3	55 s/d kurang dari 70%	Cukup berhasil	3
4	Kurang dari 55%	Tidak berhasil	0
Jumlah			75

Tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12.60%	11.56 %	91.75
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00 %	100.00 %	100.00
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN.	75.00 %	75.00 %	100.00
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	82.00%	85.00 %	103.66
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %	100.00 %	100.00
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata			
	Nilai UN rata-rata SD	6.00	6.00	100.00
Nilai UAS rata-rata SD	7.50	7.50	100.00	
Nilai UN rata-rata SLTP	6.00	6.00	100.00	

	Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	8.00	100.00
	Nilai UN rata-rata SLTA	6.00	6.00	100.00
	Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	8.00	100.00
	Nilai UN rata-rata paket B	5.00	6.00	120.00
	Nilai UAS rata-rata paket B	6.50	7.00	107.69
	Nilai UN rata-rata paket C	5.00	6.00	120.00
	Nilai UAS rata-rata paket C	7.00	8.00	114.29
	4 Angka kelulusan			
	SD	100.00%	100.00 %	100.00
	SLTP	100.00%	100.00 %	100.00
	SLTA	100.00%	100.00 %	100.00
	5 Angka putus sekolah			
	SD	0.06%	0.07%	83.33
	SLTP	0.07%	0.06%	114.29
	SLTA	0.09%	0.08%	111.11
	6 Angka ratarata lama sekolah			
	SD	6 Thn	6 Thn	100.00
	SLTP	3 Thn	3 Thn	100.00
	SLTA	3 Thn	3 Thn	100.00
	7 Angka partisipasi murni			
	SD	92.00%	82.22 %	89.37
	SLTP	75.00 %	78.36 %	104.48
	SLTA	75.00 %	73.49 %	97.99
	8 Angka partisipasi kasar			
	SD	99.21%	95.43 %	96.19
	SLTP	75.00 %	87.66 %	116.88
	SLTA	75.00%	80.43 %	110.94
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
	SD	1 : 175	1 : 192	90.29
	SLTP	1 : 182	1 : 338	19.78
	SLTA	1 : 275	1 : 286	96.00
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 30	1 : 26	113.33
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 29	1 : 25	113.79
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32	1 : 22,5	129.69

	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 18	1 : 16	111.11
	14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 15	1 : 12	120.00
	15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 15	1 : 11	126.67
Sasaran Strategis 3:				
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	71 Thn	70 Thn	98.59
	2 Angka prevalensi penyakit			
	Malaria	< 10‰	5.2 ‰	147.47
	TBC	225/100.00 0 Pddk	219/100.00 0 Pddk	102.67
	DBD	3‰	0.6‰	180,00
	HIV	0, 5/1.000 Pddk	0,03/1.000 Pddk	194.00
	3 Angka kematian kasar (per 1.000 pddk)			
	Karena penyakit Malaria	<5 per 100.000 Pddk	0 per 100.000 Pddk	200.00
	Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	1.6 per 100.000 Pddk	115.79
	Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	3.4 per 100.000 Pddk	55.88
	Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	1 per 100.000 Pddk	179.59
	4 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	65.00 %	56.00 %	86.15
	5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	5.8/1.000 KH	117.14
	6 Angka kematian balita	5/1.000 KH	1.93/1.000 KH	161,40
	7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.00 0 KH	122/100.00 0 KH	112.86
	8 Persentase balita gizi buruk	2.00 %	0.6 %	170.00
	9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk	16 : 100.000 Pddk	94.12

	10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk	7 : 100. Pddk	70.00
	11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : 100.000 Pddk	123 : 100.000 Pddk	82,00
	12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk	231 : 100.000 Pddk	89.30
	13 Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60 Balita	1 : 83 Balita	72,29
	14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 pddk	1 : 21.802 pddk	137.60
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 pddk	1 : 15.573 pddk	96.32
	16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00 %	71.42 %	71.42
	17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00 %	100.00 %	100.00
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %	100.00 %	100.00
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00 %	90.00 %	100.00
	20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk			
	Annual Malaria Incidence (AMI)	20.00 %	40.00 %	47.50
	Annual Parasite Incidence (API)	< 10%	5.20%	148.00
Sasaran Strategis 4:				
Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50.00 %	50.13 %	100.25
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	20.00 %	19.99 %	99.93
	3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00 %	99.00%	99.00
	4 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	20.00 %	17.81 %	89.05

	5 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan - MCK Komunal - Drainase /goronggorong - Jalan lingkungan 6 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda 7 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	51.61 % 14.45 % 17.97 % 100.00 % 30 KK	51.61 % 14.44 % 17.82 % 100.00 % 30 KK	100.00 99.93 99.17 100.00 100.00
Sasaran Strategis 5:				
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata 2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan 3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	5 Lokasi 73.05 % 40.36 %	5 Lokasi 73.05 % 40.36 %	100.00 100.00 100.00
Sasaran Strategis 6:				
Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan 2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat 3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu 4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	2.92 % 0.08 % 100.00 % 45.00 %	1.86 % - % 100.00 % 39.63 %	63.74 100.00 100.00 88.07
Sasaran Strategis 7:				
Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1 Nilai modal kerja dan investasi UKM 2 Nilai omzet UKM 3 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	Rp 1.018.469.557.942.00 Rp 2.690.568.153.097.00 37 Klp.	Rp 935.456.416.220.00 Rp 2.549.299.048.270.00 31 Klp.	91.85 94.75 83.78

	4 Tingkat pengangguran terbuka	6.50 %	-	-
	5 Pendapatan perkapita	Rp33.534.337.00	Rp35.151.093.00	104.82
	6 Laju pertumbuhan ekonomi	8.10 %	8.12 %	100.25
	7 Tingkat Inflasi	4.51 %	1.91 %	157.65
Sasaran Strategis 8:				
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	100.00 %	100.00 %	100.00
	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	35 Jenis	32 Jenis	91.43
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan saranamemadai	12 Tempat	11 Tempat	91.67
	4 Rasio penduduk berKTP	1 : 0,8	1 : 0,78	97.44
	5 Rasio penduduk berKK	1 : 0,9	1 : 0,88	97.73
	6 Rasio bayi berakte kelahiran	1 : 0,7	1 : 0,51	62.75
Sasaran Strategis 9:				
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	71 Klp.	70 Klp.	98.59
	2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30 Klp.	58 Klp.	193.33
Sasaran Strategis 10:				
Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100.00 %	100.00 %	100.00
	2 Jumlah Taman Pengajian AlQuran yang dibina	100 TPQ	183 TPQ	183.00
	3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100.00
	4 Ratarata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	43 Orang	21 Orang	151.17

	5 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00 %	88.99%	88.99
	6 Persentase situs budaya yang dilestarikan	40.00 %	34.48 %	86,20
Sasaran Strategis 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda	8 Perda	100.00
	2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100.00
	3 Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00 %	100.00%	100.00

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016, diketahui kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari 11 (sebelas) sasaran tahun 2016, sebanyak 10 (sepuluh) sasaran mencapai hasil optimal $\geq 85\%$ dan hanya 1 (satu) sasaran yang nilainya capaiannya rendah. 11 (sebelas) sasaran strategis tersebut, mempunyai indikator sasaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran tersebut sebanyak 67 (89,00%) mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$ dan hanya 8 (delapan) indikator sasaran (10,66%) yang nilai capaiannya kurang optimal $< 85,00\%$. pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12,60 %	11,56 %	91,75 %
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik	75,00 %	75,00 %	100,00 %
JUMLAH RATA-RATA				97,25

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, yaitu: persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan, persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih, dan persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$.

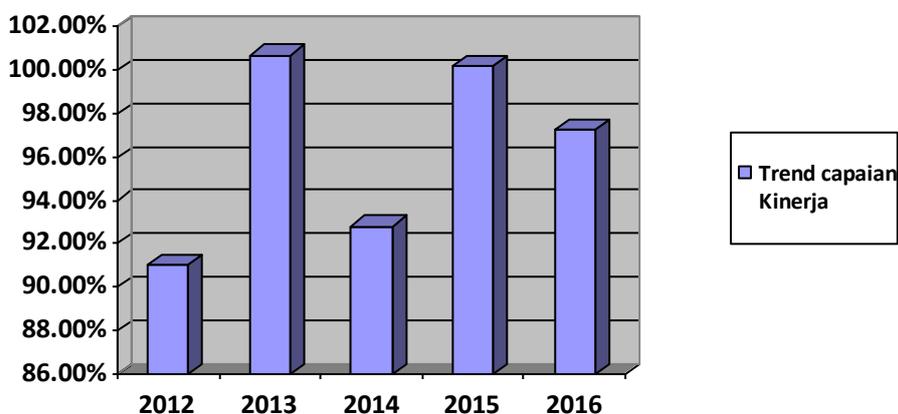
Realisasi kinerja sasaran 1, yaitu: **Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan mencapai 97,25%**. Capaian kinerja sasaran 1 tersebut, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Trend Capaian Sasaran 1 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	91,02 %	100,70 %	92,82 %	100,22 %	97,25%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan, capaian 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian terendah tahun 2012 dengan nilai capaian 91,02%, tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 100,70 %. Capaian tahun 2016 sebesar 97,25% tersebut, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,22%, maka terjadi penurunan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 2.97%.

Gambar 3.1
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan
di Luar Kawasan Perkotaan Secara Berkeadilan 5 Tahun terakhir



Sasaran 2:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,00 %	85,00 %	103,66
2	Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00
3	Nilai UN dan UAS RataRata			
	- Nilai UN Ratarata SD	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata SD	7.50	7,50	100,00

	- Nilai UN Ratarata SLTP	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata SLTP	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN Ratarata SLTA	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata SLTA	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN RataRata Paket B	5,00	6,00	120,00
	- Nilai UAS RataRata Paket B	6,50	7,00	107,69
	- Nilai UN RataRata Paket C	5,00	6,00	120,00
	- Nilai UAS RataRata Paket C	7,00	8,00	114,29
4	Angka Kelulusan			
	- SD	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTP	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTA	100,00 %	100,00 %	100,00
5	Angka putus sekolah			
	- SD	0,06 %	0,07 %	83,33
	- SLTP	0,07 %	0,06 %	114,29
	- SLTA	0,09 %	0,08 %	111,11
6	Angka ratarata lama sekolah			
	- SD	6 Tahun	6 Th	100,00
	- SLTP	3 Tahun	3 Th	100,00
	- SLTA	3 Tahun	3 Th	100,00
7	Angka partisipasi murni			
	- SD	92,00 %	82,22 %	89,37
	- SLTP	75,00 %	78,36 %	104,48
	- SLTA	75,00 %	73,49 %	97,99
8	Angka partisipasi kasar			
	- SD	99,21 %	95,43 %	96,19
	- SLTP	75,00 %	87,66 %	116,88
	- SLTA	75,00 %	80,43 %	110,94
9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
	- SD	1 : 175 %	1 : 192 %	90,29
	- SLTP	1 : 182 %	1 : 338 %	19,78
	- SLTA	1 : 275 %	1 : 286 %	96,00
10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:30	1:26	113,33
11	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:29	1:25	113,79
12	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32	1:22,5	129,69

13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:18	1:16	111,11
14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:15	1:12	120,00
15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:15	1:11	126,67
JUMLAH RATA-RATA				103,08

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, sebanyak 13 (tiga belas) indikator sasaran mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, angka melek huruf seluruh penduduk, nilai UN dan UAS rata-rata, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA, rasio guru terhadap murid pada tingkat SD, rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP, dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa terdapat indikator sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi yaitu:

1. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP nilai capaian 120,00%. Target indikator rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 1:15 realisasinya 1:12. Tingginya nilai capaian tersebut karena terjadi kelebihan jumlah guru pada jenjang SLTP. Kondisi ideal sesuai target rasio guru terhadap murid 1:15, kondisi riil 1:12. Jika berdasarkan target rasio 1:15 dengan jumlah siswa yang ada di Kota Ternate tahun 2016 yaitu sebanyak 8.671 siswa, maka jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak 578 orang, namun guru yang ada sebanyak 736 orang, berarti terjadi kelebihan guru sebanyak 158 orang. Kelebihan guru tersebut terkonsentrasi pada beberapa mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA, namun juga terdapat guru mata pelajaran yang masih kurang sesuai kebutuhan yaitu: Seni Budaya, TIK, Mulok dan BP/BK. Kelebihan guru tersebut disebabkan adanya guru yang mutasi masuk dan juga guru titipan karena mengikuti suami yang bekerja di Kota Ternate
2. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA nilai capaian 126,67%. Target indikator rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA 1:15 realisasinya 1:11. Tingginya nilai capaian tersebut karena terjadi kelebihan jumlah guru. Kondisi ideal sesuai target rasio guru terhadap murid 1:15, kondisi riil 1:11. Jika berdasarkan target rasio 1:15 dengan jumlah siswa yang ada di Kota Ternate tahun 2016 yaitu

sebanyak 9.615 siswa, maka jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak 641 orang, namun guru yang ada sebanyak 890 orang, berarti terjadi kelebihan guru sebanyak 249 orang.

Namun, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang nilai capaian rendah, yaitu rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah nilai capaian rata-rata 68.69. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan capaian pada rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang SLTP target 1:182 realisasi 1:338 nilai capaian 19,78%. Rendahnya capaian indikator kinerja tersebut disebabkan sampai akhir tahun 2016, jumlah sekolah jenjang SLTP hanya sebanyak 29 sekolah sehingga terjadi konsentrasi jumlah murid yang sangat besar pada sekolah tertentu.

Upaya yang akan dilakukan kedepan adalah melakukan penambahan sekolah pada jenjang SLTP sesuai kebutuhan jumlah siswa.

Capaian kinerja sasaran 2, yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7

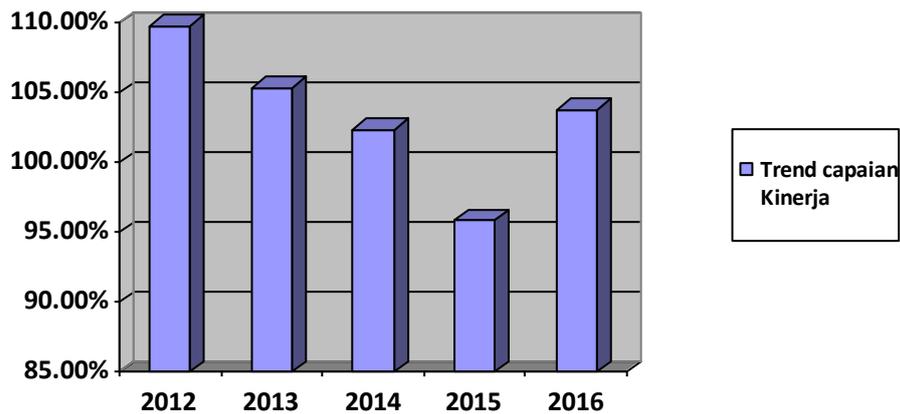
Trend Capaian Sasaran 2 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	109,82%	105,39 %	104,34 %	95,58 %	103.08%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada

tahun 2012 dengan nilai capaian 109,82%, capaian terendah tahun 2015 yaitu 95,58%. Capaian tahun 2016 sebesar 103,08%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 95,58%, maka tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 7,50%.

Gambar 3.2
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Dengan Perluasan Akses Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau Sarana Dan Fasilitas Yang Memadai, Tenaga Guru Yang Cukup Dan Mutu Yang Terus Membaik 5 Tahun Terakhir



Capain indikator kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik, jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal nasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 19a/U/2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD target SPM Nasional 1:32, realisasi di Kota Ternate 1:26. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional;
2. Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP target SPM Nasional 1:36, realisasi di Kota Ternate 1:26. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional;
3. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD target SPM Nasional 1:32, realisasi di Kota Ternate 1:16. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional .

4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI target SPM Nasional 1% dari jumlah siswa yang bersekolah, realisasi di Kota Ternate dibawah target SMP Nasional yaitu 0,07%.
5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MI target SPM Nasional 1% dari jumlah siswa yang bersekolah realisasi di Kota Ternate dibawah target SMP Nasional yaitu 0,06%
6. Angka Putus Sekolah (APS) SLTA target SPM Nasional 1% dari jumlah siswa yang bersekolah realisasi di Kota Ternate dibawah target SMP Nasional yaitu 0,08%.

Sasaran 3:**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Angka usia harapan hidup	71 Thn	70 Thn	98,59
2	Angka prevalensi penyakit			
	- Malaria	< 10 ‰	5,2 ‰	147,47
	- TBC	225/100.0 Pddk	219/100.0 Pddk	102,67
	- DBD	00 ‰	00 ‰	180,00
	- HIV	3 Pddk	0,6 Pddk	194,00
		0,5/1.000	0,03/1.000	
3	Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)			
	- Karena penyakit Malaria	< 5 per Pddk 100.000 Pddk	0 per Pddk 100.000 Pddk	200,00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per Pddk 100.000 Pddk	1,6 per Pddk 100.000 Pddk	115,79
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000	3,4 per 100.000	55,88
	- Karena penyakit HIV	< 5 per 100.000	1 per 100.000	179,59
4	Angka kesembuhan penderita TB paru	65,00 %	56,00 %	86,15
5	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	5,8/1.000 KH	117,14

6	Angka kematian balita	5/1.000 KH	1,93/1.000 KH	161,40
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000 KH	122/100.000 KH	112,86
8	Persentase gizi buruk pada balita	2,00 %	0,6 %	170,00
9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17:100.000 Pddk	16:100.000 Pddk	94,12
10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : Pddk 100.000	7 : Pddk 100.000	70,00
11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : Pddk 100.000	123 : Pddk 100.000	82,00
12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : Pddk 100.000	231: Pddk 100.000	98,30
13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60	1 : 83	72,29
14	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk	1 : 21,802 Pddk	137,60
15	Rasio pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk	1 : 15.573 Pddk	96,32
16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %	71,42 %	71,42
17	Persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam	100,00 %	100,00 %	100,00
18	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00
19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90,00 %	90,00 %	100,00
20	Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk: 1) <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) 2) <i>Annual parasite incidence</i> (API)	20,00 ‰ <10,00 ‰	40,00 ‰ 5,20 ‰	47,50 148,00
JUMLAH RATA-RATA				116.26

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 16 (enam belas) indikator sasaran mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: angka usia harapan hidup, angka prevalensi penyakit Malaria, angka kematian

kasar per 1.000 penduduk, angka kesembuhan penderita TB Paru, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita, Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, persentase gizi buruk pada balita, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio perawat per 100.000 penduduk, rasio Puskesmas per satuan penduduk, rasio Pustu per satuan penduduk, persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam, persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi $\geq 110,00\%$, yaitu :

1. Angka prevalensi penyakit, nilai capaian rata-rata 156,03. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan optimalnya penanganan Malaria, TBC, DBD dan HIV. Optimalnya penanganan karena adanya upaya tata laksana pengobatan:
 - 1) Penyakit Malaria melalui pencegahan penyakit malaria dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan perbaikan kesehatan lingkungan.
 - 2) Penyakit TBC melalui sosialisasi program TBC, program penemuan dan penanganan kasus TBC oleh petugas puskesmas, pemantauan dan pendampingan minum obat (PMO) oleh petugas, anggota keluarga dan kader TBC, pelatihan kader TBC dan survey kontak penderita TBC yang serumah dan lingkungan sekitarnya.
 - 3) Penyakit DBD, karena telah meningkatkan sistem kewaspadaan dini, optimalnya kegiatan penyuluhan baik di luar gedung maupun di dalam gedung, meningkatkan koordinasi dalam pelaporan, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang protap penanganan DBD, meningkatkan SKD dan PWS yang diikuti dengan upaya-upaya pencegahan (instruksi SKD dari puskesmas ke kelurahan, distribusi abate, meningkatkan pengawasan jentik dengan kegiatan abatesasi.
 - 4) Penyakit HIV karena telah dilakukan perbaikan dalam pengendalian penyakit HIV yang dilaksanakan dengan beberapa upaya, diantaranya :
 - a. Pengembangan layanan IMS, HIV AIDS, tahun 2007-2014 layanan tes HIV hanya tersedia 1 Layanan yaitu RSUD dr. H. Chasan Bosoirie Ternate tahun 2015-2016 Pengembangan Layanan
 - Puskesmas Kalumata
 - Puskesmas Kalumpang
 - Puskesmas Siko
 - Puskesmas Gambesi
 - Puskesmas Kota
 - Puskesmas Sulamadaha
 - b. Pengembangan SDM terlatih, Kader HIV dan Konselor HIV dan Petugas Lab terlatih dengan berbagai disiplin profesi (Dokter, Perawat, Bidan Tenaga

- Kesehatan Lainnya, Analisis) yang tersebar di 6 Puskesmas dengan jumlah terkini.
- c. Tersedianya Logistik IMS, HIV dan Sarana Pendukung
 - d. Aktif Case Deteksion melalui kegiatan Mobile dengan Sasaran tidak hanya terpusat pada populasi beresiko (WPS, Waria, LSL, WBP, Pel. Pekerja Seks) namun sasaran kegiatan VCT/KTS juga pada Populasi rentan tertular HIV (IRT, Ibu Hamil, Pasangan IMS, dan Masyarakat Umum lainnya)
 - e. Kolaborasi dan Integrasi Program (TB, PPIA, Cantin)
 - f. Sosialisasi IMS, HIV AIDS dengan melibatkan Kader HIV yang telah dilatih
 - g. Akses rujukan ODHA untuk mendapatkan pengobatan lebih cepat
 - h. Dukungan Psikososial terhadap ODHA lebih maksimal karena peran LSM
2. Angka kematian kasar per 1.000 penduduk nilai capaian rata-rata 137,81%. Tingginya nilai capaian tersebut karena optimalnya penanganan dan pencegahan berbagai penyakit yang rawan mengakibatkan kematian.
3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup nilai capaian 117,14. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan antara lain:
- a. Memberikan makanan tambahan (PMT) pada Bumil KEK;
 - b. Meningkatkan kunjungan rumah untuk melakukan kunjungan Neonatal;
 - c. Meningkatkan penyuluhan berbasis masyarakat (TOMA, TOGA);
 - d. Melakukan penyuluhan tanda bahaya pada bayi; dan
 - e. Melakukan manajemen terpadu pada bayi muda untuk skrining bayi dengan faktor resiko.
4. Angka kematian balita nilai capaian 161,40%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya upaya yang dilakukan antara lain:
- a. Peningkatan penyuluhan kepada keluarga untuk lebih dini membawa anak ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan secara cepat;
 - b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan balita;
 - c. Secara berkesinambungan melakukan penyuluhan tentang PHBS di tingkat keluarga;
 - d. Melakukan Deteksi tumbuh kembang pada anak balita setiap 6 bulan di Posyandu dan pemberian Vitamin A pada balita; dan
 - e. Penerapan MBTS secara optimal di Puskesmas.
5. Persentase gizi buruk pada balita nilai capaian 170,00%. Sesuai target 2,00% realisasinya 0,6%. Pengukuran pada indikator tersebut yaitu apabila realisasinya semakin rendah, maka nilai capaiannya semakin tinggi. Tingginya nilai capaian

tersebut disebabkan: pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang secara kontinyu melalui Posyandu; dan pelacakan kasus gizi buruk secara kontinyu

6. Rasio Puskesmas per satuan penduduk nilai capaian 137,60%. Sesuai target yaitu 1:30.000 penduduk, terealisasi 1:21.802 penduduk. Tingginya nilai capaian tersebut karena sampai akhir tahun 2016 Puskesmas di Kota Ternate telah berjumlah 10 Puskesmas

Dari tabel tersebut diatas juga terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu:

1. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk nilai capaian 70,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan terbatas jumlah Dokter Gigi di Kota Ternate yaitu hanya 12 orang karena Kebijakan Moratorium PNS solusinya kedepan adalah mengkat Dokter PTT Daerah dan PTT Pusat.
2. Rasio bidan per 100.000 penduduk nilai capaian 82,00%. Rendahnya nilai capaiannya tersebut disebabkan keterbatasan jumlah Bidan PNS karena Kebijakan Moratorium PNS solusinya kedepan adalah mengkat Bidan PTT Daerah dan PTT Pusat.
3. Rasio Posyandu terhadap balita nilai capaian 72,29%. Rendahnya nilai capaian tersebut karena pembentukan satu Posyandu harus memenuhi persyaratan dan sasaran sekaligus mengalami kesulitan membuat posyandu karena tidak konstannya jumlah sasaran bagi disetiap RT/RW/Kelurahan dan kesediaan menjadi kader Posyandu juga berpengaruh terhadap pembentukan Posyandu. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut kedepan, yaitu melalui : pembentukan postimbang di setiap RW/RT dan rekrutan kader postimbang untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita serta ibu hamil dan upaya proaktif kader posyandu/postimbang menjemput di rumah-rumah sasaran anak balita agar datang ke posyandu/postimbang.
4. Persentase kecamatan bebas rawan gizi nilai capaian 71,42% Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih terdapat Kecamatan yang masih rawan status gizi buruk dan kurang di atas 15 % .Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan pendampingan posyandu pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak serta pendampingan balita gizi buruk dan gizi kurang melalui pendekatan Konseling Keluarga.

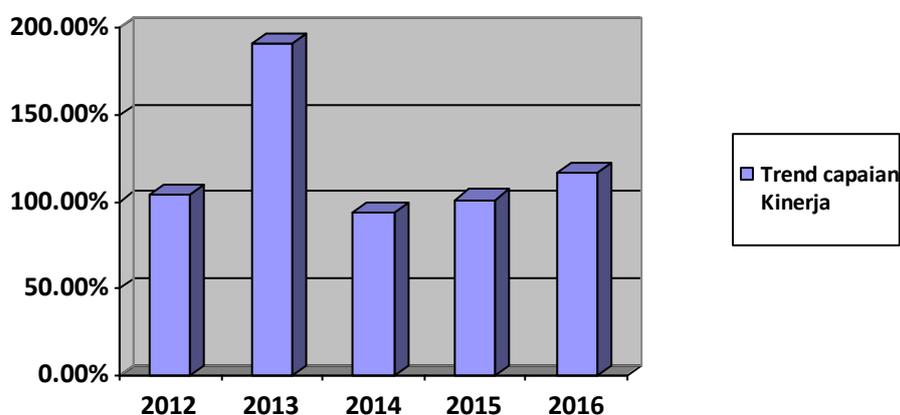
Trend capaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Trend Capaian Sasaran 3 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	104,14%	190,98 %	93,98 %	101,13%	116,26%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 3, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 190,98%, capaian terendah tahun 2014 yaitu 93,98%. Capaian tahun 2016 yaitu 116,25% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 101,13% maka terjadi kenaikan capaian tahun 2016 sebesar 14,99%.

Gambar 3.3
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5 Tahun terakhir



Capain indikator kinerja sasaran 3 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat , jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal nasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kota maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan, target SPM Nasional 100.00%, realisasi di Kota Ternate 100.00%, capaian kinerja indikator tersebut telah sesuai dengan target nasional;

2. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, target SPM nasional 90%, realisasi di Kota Ternate 90.00%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator tersebut di Kota Ternate telah sesuai dengan target SPM Nasional.

Sasaran 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50,00 %	50,13 %	100,25
2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	20,00 %	19,99 %	99,93
3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00 %	99,00 %	99,00
4	Persentase Peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	20,00 %	17,81 %	89,05
5	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan: - MCK Komunal - Drainase /goronggorong - Jalan lingkungan	51,61 % 14,45 % 17,97 %	51.61 % 14.44 % 17.82 %	100.00 99.93 99.17
6	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00 %	100,00 %	100,00
7	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100,00
JUMLAH RATA-RATA				98.59

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran, semuanya mencapai target optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, persentase realisasi dana partisipatif kecamatan, persentase peningkatan dana pembangunan kelurahan, persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, persentase pemberian bantuan pembinaan bagi

generasi muda, dan jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah. Dari 7 (tujuh) indikator sasaran yang mencapai hasil optimal tersebut,

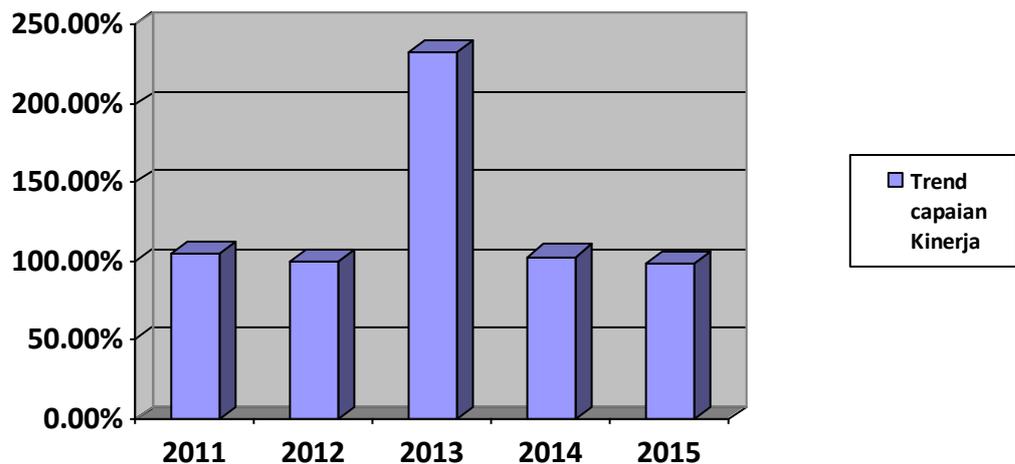
Capaian kinerja sasaran 4 terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Trend Capaian Sasaran 4 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	100,00%	232,17 %	102,92 %	98.42 %	98.59%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 11, yaitu terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 232,17 %, capaian terendah tahun 2015 yaitu 98.42%. Capaian tahun 2016 yaitu 98.59%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 102,92%, maka terjadi peningkatan capaian tahun 2016 sebesar 0.17%.

Gambar 3.4
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Terwujudnya Kebijakan Anggaran (APBD) Yang Proporsional
Dan Pro Rakyat 5 Tahun Terakhir



Sasaran 5:

Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata	5 lokasi	5 lokasi	100,00
2	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	73,05 %	73,05 %	100,00
3	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40,36 %	40,36 %	100,00
JUMLAH RATA-RATA				100,00

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran mencapai target $\geq 85,00\%$, yaitu: Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata, persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan dan rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

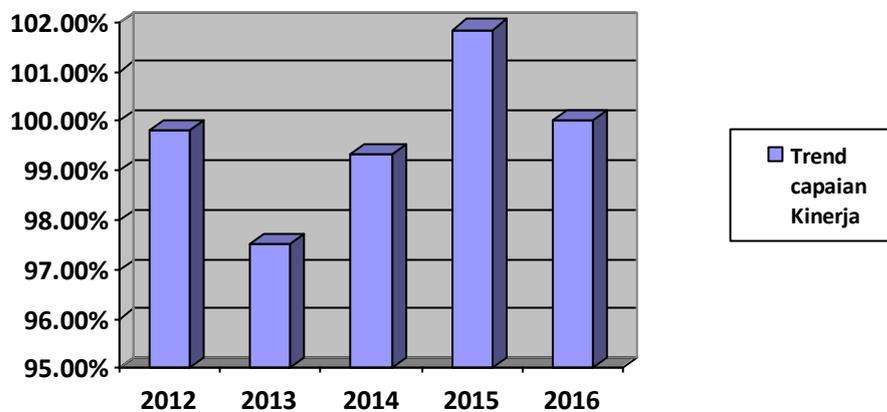
Capaian kinerja sasaran 5: tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Trend Capaian Sasaran 5 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	99,81%	97,51 %	99,33 %	101.84%	100,00%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 5, yaitu tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan nilai capaian 101.84%, capaian terendah tahun 2013 yaitu 97,51%. Capaian tahun 2016 yaitu 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 101.84%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2016 sebesar 1,84%.

Gambar 3.5
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Tertatanya Infrastruktur Perkotaan Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Dengan Pemanfaatan Ruang Kota Secara Terpadu 5 Tahun Terakhir



Sasaran 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	2,92 %	1.86 %	63,74
2	Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0,08 %	- %	100,00
3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00
4	Ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45,00 %	39.63 %	88.07
JUMLAH RATA-RATA				87,95

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator sasaran mencapai hasil optimal, yaitu: persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu, rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK dan presentase PNS yang diberikan sanksi berat. Namun terdapat 1 (satu) indikator nilai capaiannya rendah, yaitu indikator PNS yang memperoleh penghargaan dengan nilai capaian 63,74%. Rendahnya capaian indikator tersebut disebabkan sebagian pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Ternate tidak mengusulkan PNS yang telah memenuhi syarat memperoleh penghargaan, sehingga dari target 171 orang hanya sebanyak 109 orang yang memperoleh penghargaan. Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk mengoptimalkan capaian indikator tersebut, yaitu melakukan koordinasi dengan Pimpinan SKPD dalam hal pengusulan PNS yang akan memperoleh penghargaan.

Capaian kinerja sasaran 6 : terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

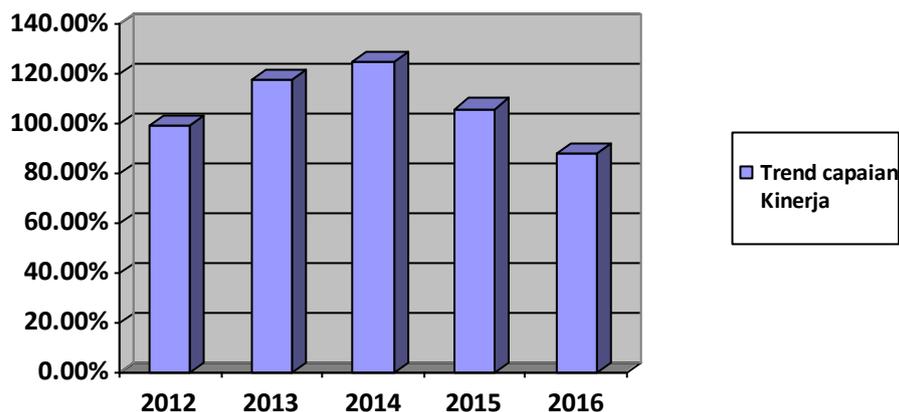
Tabel 3.15
Trend Capaian Sasaran 6 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	99,37%	118,01%	124,74%	106,09%	87,95%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 6, yaitu terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2014

dengan nilai capaian 124,74%, capaian terendah tahun 2016 yaitu 62.95%. Capaian Tahun 2016 sebesar 87,95% jika dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 106.09%, maka terjadi penurunan sebesar 18.14%

Gambar 3.6
Grafik trend capaian kinerja sasaran:
Terwujudnya Good Government, Dengan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Kreatif, Inovatif, Yang Mampu Menjamin Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas Dan Kemandirian Masyarakat 5 Tahun Terakhir



Sasaran 7:

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai modal kerja dan investasi UKM	Rp1.018.469.557.942,00	Rp935.456.416.220, 00	91,85
2	Nilai Omzet UMKM	Rp2.690.568.153.097,00	Rp2.549.299.048.270,00	94,75
3	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	37 Klp.	31 Klp.	83,78
4	Tingkat pengangguran terbuka	6,50 %	-	-
5	Pendapatan perkapita	Rp33.534.337,00	Rp35.151.093.00	104,82
6	Laju pertumbuhan ekonomi	8.10%	8,12%	100,25
7	Tingkat Inflasi	4,51%	1.91%	157,65
JUMLAH RATA-RATA				105,52

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 5 (lima) indikator sasaran mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu:

nilai modal kerja dan investasi UKM, nilai Omzet UMKM, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pada indikator tersebut di atas terdapat 1 (satu) indikator yang nilai capainya sangat tinggi, yaitu tingkat inflasi, nilai capaian 157,65%. Target indikator tingkat inflasi tahun 2016 4,51% realisasi 1,91% dengan demikian nilai capainya 157,65%. Tingginya nilai capaian tersebut karena Pemerintah Kota Ternate mampu mengendalikan tingkat inflasi pada tahun 2016 dengan menekan tingkat kenaikan harga melalui beberapa kegiatan operasi pasar dan juga melakukan pengawasan terhadap fluktuasi harga barang dan distribusi serta kapasitas produksi barang.

Namun demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang nilai capainya rendah, yaitu jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan nilai capaian 83,78%. Target indikator jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan tahun 2016 sejumlah 37 kelompok, realisasinya 31 kelompok sehingga nilai capainya 83,78%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya kenaikan harga beberapa barang/peralatan yang merupakan item utama bantuan sehingga berpengaruh pada pengurangan jumlah kelompok target penerima bantuan. Untuk mengoptimalkan capaian indikator tersebut kedepan akan dilakukan perbaikan perencanaan pada perhitungan fluktuasi harga barang sehingga tidak terjadi kesalahan prediksi harga yang berlaku dipasaran.

Juga terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak dapat dilakukan pengukuran, yaitu indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), disebabkan pada tahun 2016 BPS tidak merilis angka TPT pada level Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan sampel survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) akibat penghematan anggaran Kementerian/Lembaga. sementara, angka TPT yang disajikan BPS di tahun 2016 hanya sampai pada level provinsi.

Realisasi capaian kinerja sasaran 7 meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional dengan nilai capaian tahun sebesar 105,52%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 112,38%, berarti terjadi penurunan nilai capaian sebesar 6.86%

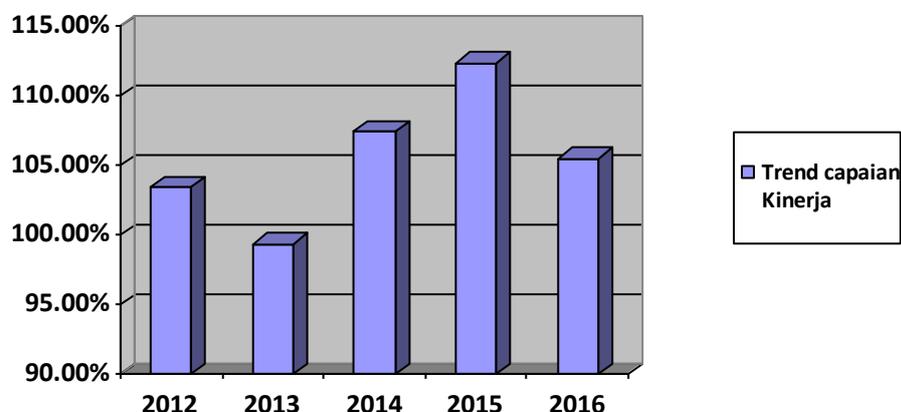
Capaian kinerja sasaran 7 yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Trend Capaian Sasaran 7 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional	103,41%	99,36%	107,40%	112,38%	105,52%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 7, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan nilai capaian 112,38%, capaian terendah tahun 2013 yaitu 99,41%. Capaian tahun 2016 sebesar 105,52%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 112,38%, berarti terjadi penurunan nilai capaian sebesar 6.86%

Gambar 3.7
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran:
Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh, Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Tradisional 5 Tahun Terakhir



Sasaran 8:

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	100,00%	100,00%	100,00
2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	35 Jenis	32 Jenis	91,43
3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	12 Tempat	11 Tempat	91,67
4	Rasio penduduk ber KTP	1 : 0,8	1 : 0,78	97,44
5	Rasio penduduk ber KK	1 : 0,9	1 : 0,88	97,73
6	Rasio bayi ber akte kelahiran	1 : 0,7	1 : 0,51	62,75
JUMLAH RATA-RATA				90,17

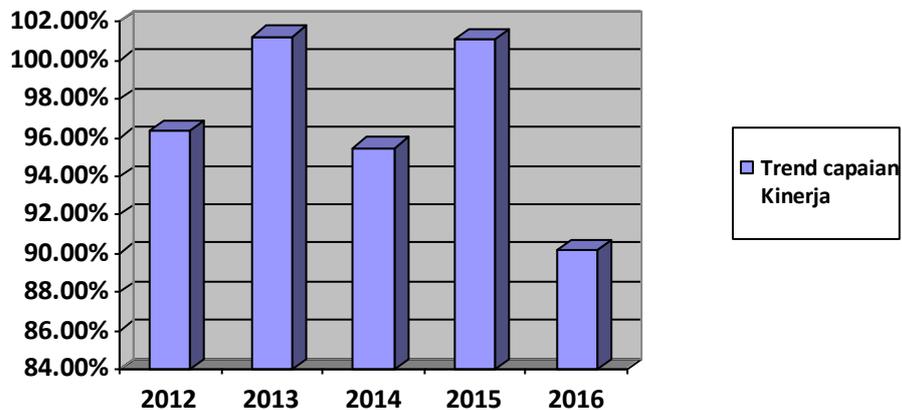
Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, sebanyak 5 (lima) sasaran mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP, jumlah layanan perizinan bebas biaya, jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai, Rasio penduduk ber KTP, Rasio penduduk ber KK, namun terdapat 1(satu) indikator yang nilai capaiannya rendah yaitu rasio bayi berakte kelahiran nilai capaiannya 62,75%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya akte kelahiran sehingga berdampak pada kurang paham dan kurang perdulinya orang tua untuk segera mengurus akte kelahiran anak sejak lahir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepan akan dilakukan sosialisasi secara optimal dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam memberikan informasi dan pelayanan akte kelahiran. Capaian realisasi kinerja sasaran 8 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Trend Capaian Sasaran 8 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	96,35 %	101,25 %	95,48 %	101,09 %	90,17 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 8, yaitu terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 101,25 %, capaian terendah tahun 2011 yaitu 95,48%. Capaian tahun 2016 sebesar 90,17% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 101,09%, berarti terjadi penurunan sebesar 10,92%.

Gambar 3.8
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Nyaman Dan Berkualitas 5 Tahun Terakhir



Sasaran 9:

Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	71 Klp.	70 Klp.	98,59
2	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30 Klp.	58 Klp.	193,33
JUMLAH RATA-RATA				145,96

Pencapaian kinerja pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 2 dua) indikator sasaran semuanya mencapai hasil optimal di atas $\geq 85,00\%$, yaitu: jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan dan Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan. Pada indikator jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengelola hasil perikanan nilai capaian 193,33%, tingginya nilai capaian tersebut karena adanya penambahan jumlah kelompok penerima bantuan, yaitu rencana awal 30 kelompok realisasinya menjadi 58 kelompok.

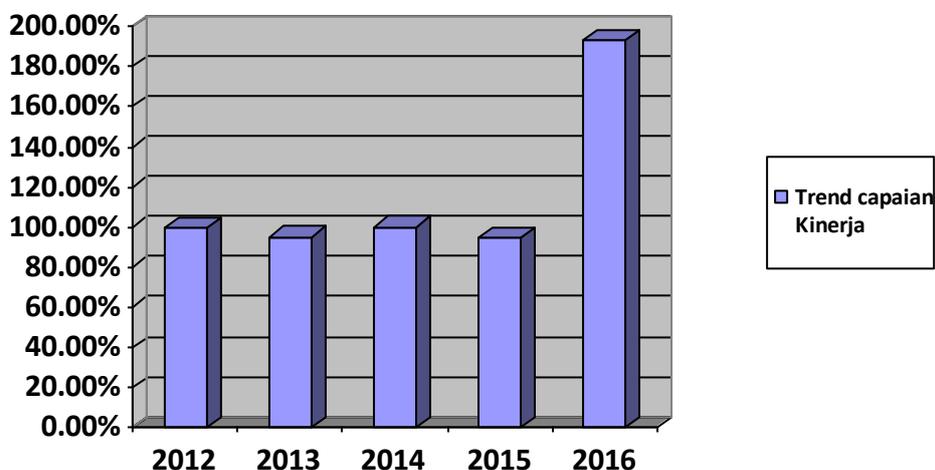
Capaian realisasi kinerja sasaran 9 tersebut pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Trend Capaian Sasaran 9 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2016	2016
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	99,67 %	94,97%	100,00 %	94.64 %	193,33 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 9, yaitu meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan nilai capaian 193,33%, capaian terendah tahun 2015 yaitu 94,64%. Capaian tahun 2016 yaitu 193,33%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 100,00%, maka terjadi peningkatan capaian tahun 2016 sebesar 93,33%.

Gambar 3.9
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 9:
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pesisir 5 Tahun Terakhir



Sasaran 10:

Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100,00%	100,00%	100,00
2	Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina	100 TPQ	183 TPQ	183,00
3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100,00
4	Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	43 Orang	21 Orang	151,17
5	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100,00 %	88,99 %	88,99
6	Persentase situs budaya yang dilestarikan	40,00 %	34,48 %	86,20
JUMLAH RATA-RATA				118,23

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 6 (enam) indikator sasaran semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran, jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina, jumlah pertemuan forum antar umat beragama, rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan dan persentase sekolah dasar yang telah mengajar bahasa daerah Ternate dan persentase situs budaya yang dilestarikan. Pada tabel tersebut terlihat 1 (satu) indikator sasaran yaitu jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina nilai capaian 183,00%, tingginya nilai capaian tersebut karena berdasarkan rencana awal jumlah TPQ yang akan dibina dan diberikan bantuan sebanyak 100 TPQ namun realisasinya menjadi 183 TPQ. Anggaran yang tersedia untuk tahun anggaran 2016 sebanyak Rp.262.500.000 dengan rencana awal diberikan bantuan kepada setiap TPQ sebesar Rp. 2.000.000, namun realisasinya ada yang diberikan Rp.2.000.000 dan ada yang menerima bantuan Rp. 1.500.000

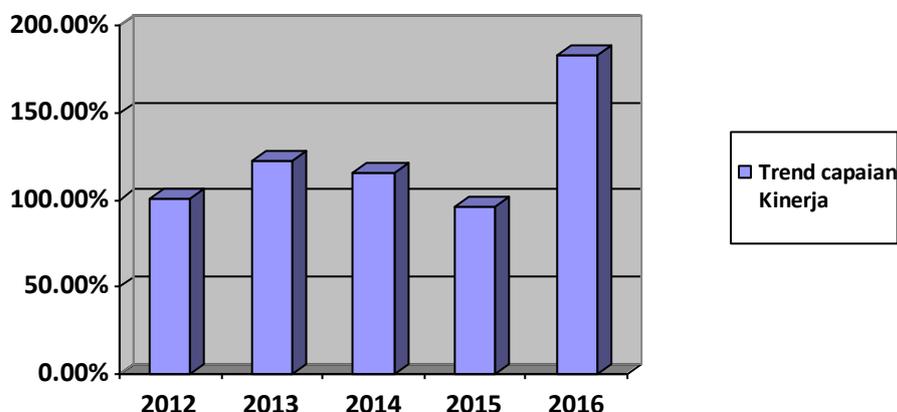
Capaian realisasi kinerja sasaran 10 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Trend Capaian Sasaran 10 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya	100,71%	122,06%	115,35%	100,80%	118,23%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 10, yaitu tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan nilai capaian 183,00%, capaian terendah tahun 2012 yaitu 100,71%. Capaian tahun 2016 yaitu 118,23%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 100,80%, maka terjadi peningkatan capaian tahun 2016 sebesar 17,43%.

Gambar 3.10
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 10 : Tertanganinya Permasalahan Menurunnya Kesadaran Spiritualitas Keberagamaan, Permasalahan Sosial, Dan Budaya 5 Tahun Terakhir



Sasaran 11:

Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda	8 Perda	100,00
2	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00
3	Persentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100,00 %	100,00 %	100,00
JUMLAH RATA- RATA				100,00

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan, persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan, dan jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani.

Realisasi kinerja sasaran 11, yaitu tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah nilai capaian 100,00%

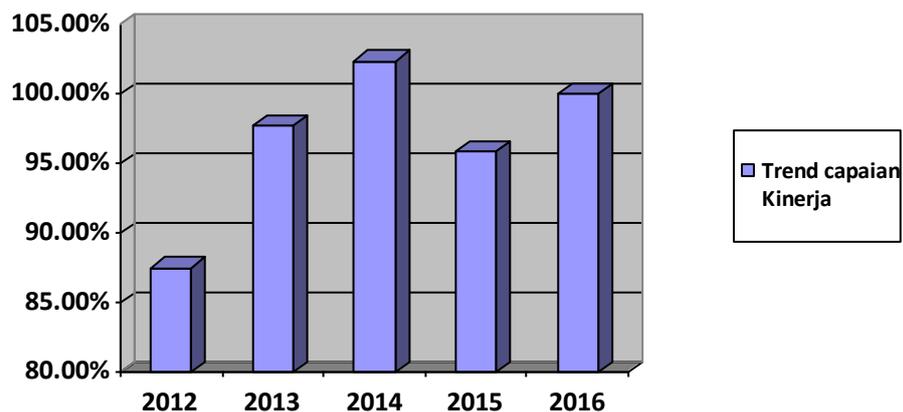
Capaian realisasi kinerja sasaran 11 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25
Trend Capaian Sasaran 11 Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	87,50 %	97,78 %	102,38 %	95,84%	100,00%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 11, yaitu tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2014 dengan nilai capaian 102,38%, capaian terendah tahun 2012 yaitu 87,50%. Capaian tahun 2016 yaitu 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 95,84%%, maka terjadi peningkatan capaian tahun 2016 sebesar 4,16%.

Gambar 3.11
Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 11 : Tertanganinya Masalah Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Daerah 5 Tahun Terakhir



C. TREND CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate 5 tahun terakhir fluktuatif yaitu sebagai berikut:

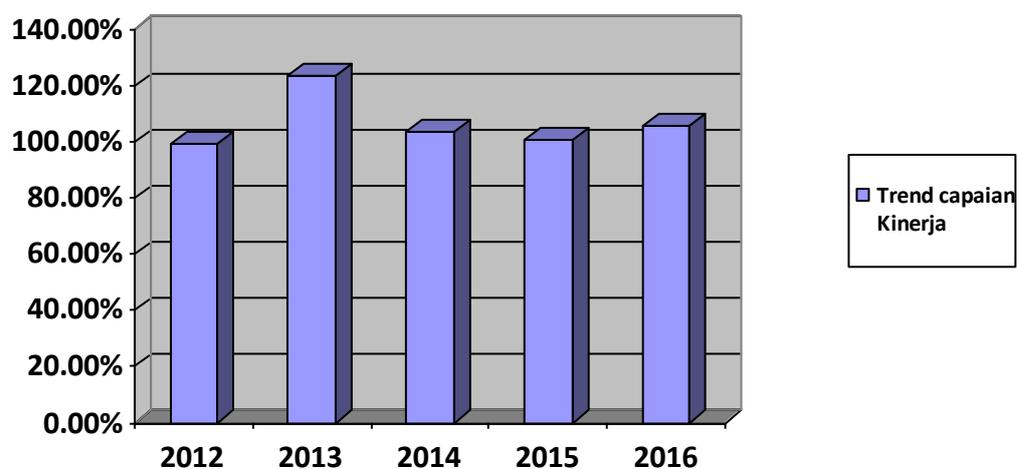
Tabel 3.26
Trend Capaian Sasaran Pemerintah Kota Ternate Pada 5 Tahun Terakhir

SASARAN		CAPAIAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	91,02%	100,70%	92,83%	100,22%	97,25%
2.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	109,82%	105,39%	104,34%	95,50%	103,08%
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	104,14%	190,61%	93,98%	101,13%	116,26%
4.	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	100,00%	232,17%	102,92%	98,42%	98,59%
5.	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	99,81%	97,51%	99,33%	101,84%	100,00%

6.	Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	99.37%	118.01%	124.74%	106.09%	87,95%
7.	Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	103.41%	99.36%	107.40%	112.38%	105.52%
8.	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	96.35%	101.25%	95.48%	101.09%	90.17%
9.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	99.67%	94.97%	100.00%	94.64%	145.96%
10.	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya	100.71%	122,06%	115.35%	100,80%	118.23%
11.	Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	87.50%	122,06%	115.35%	95,84%	100.00%
JUMLAH RATA-RATA		99,25%	123,62%	103,53%	100,72%	105.73%

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian rata-rata kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate 5 Tahun terakhir fluktuatif, capaian tertinggi tahun 2013 dengan nilai capaian rata-rata 123,62% dan terendah tahun 2012 nilai capaian rata-rata 99,25%. Capaian kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 105,73%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 105,58%, maka terjadi kenaikan sebesar 5,01%.

Gambar 3.12
Grafik Trend Rata-rata Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir



D. REALISASI ANGGARAN

Garis besar APBD Kota Ternate tahun 2016 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan terealisasi sebesar 94,90%
- Anggaran Belanja terealisasi sebesar 89,42%

Tabel 3.27
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALIASI	%
PENDAPATAN	930,174,244,411.00	882,756,713,253.11	94.90
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73,934,252,000.00	69,390,176,544.11	93.85
Pendapatan Pajak Daerah	36,100,000,000.00	40,371,419,894.00	111.83
Pendapatan Retribusi Daerah	26,005,000,000.00	16,337,695,972.00	62.83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	850,000,000.00	356,500,800.00	41.94
Lain-lain PAD Yang Sah	10,979,252,000.00	12,324,559,878.11	112.25
PENDAPATAN TRANSFER	856,239,992,411.00	813,366,536,709.00	94.99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739,196,975,000.00	735,977,355,407.00	99.56
Bagi Hasil Pajak	24,396,056,000.00	21,780,524,211.00	89.28

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,629,810,000.00	2,914,054,196.00	178.80
Dana Alokasi Umum (DAU)	621,354,106,000.00	621,354,106,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	91,817,003,000.00	89,928,671,000.00	97.94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	91,254,911,000.00	57,231,677,100.00	62.72
Dana Penyesuaian	91,254,911,000.00	57,231,677,100.00	62.72
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25,788,106,411.00	20,157,504,202.00	78.17
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,788,106,411.00	20,157,504,202.00	78.17
BELANJA	980,482,182,569.00	876,758,315,347.22	89.42
BELANJA OPERASI	777,368,520,753.00	696,074,037,585.14	89.54
Belanja Pegawai	469,034,318,719.00	424,828,883,031.00	90.58
Belanja Barang dan Jasa	295,125,912,034.00	258,471,364,554.14	87.58
Belanja Hibah	7,807,790,000.00	7,672,790,000.00	98.27
Belanja Bantuan Sosial	5,400,500,000.00	5,101,000,000.00	94.45
BELANJA MODAL	196,113,661,816.00	175,138,711,262.08	89.30
Belanja Modal Tanah	6,387,077,470.00	5,739,946,020.00	89.87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,390,977,715.00	23,762,118,596.08	80.85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68,500,343,005.00	58,631,424,444.00	85.59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90,748,130,382.00	86,531,882,802.00	95.35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,087,133,244.00	473,339,400.00	43.54
BELANJA TAK TERDUGA	7,000,000,000.00	5,545,566,500.00	79.22
Belanja Tak Terduga	7,000,000,000.00	5,545,566,500.00	79.22
TRANSFER	813,109,720.00	813,109,720.00	100.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	813,109,720.00	813,109,720.00	100.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	813,109,720.00	813,109,720.00	100.00
SURPLUS / (DEFISIT)	-51,121,047,878.00	5,185,288,185.89	-10.14
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56,850,513,878.00	-1,375,350,645.66	-2.42
Penggunaan SiLPA	0.00	-1,375,350,645.66	0.00
Pinjaman Dalam Negeri	56,850,513,878.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,877,341,000.00	9,000,000,000.00	82.74
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,877,341,000.00	9,000,000,000.00	82.74
PEMBIAYAAN NETTO	45,973,172,878.00	-10,375,350,645.66	-22.57
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-5,147,875,000.00	-5,190,062,459.77	100.82

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2016 yaitu **sebesar 105,73%**. Dari 11 (sebelas) sasaran pada perjanjian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016, semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85\%$. Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator. Dari 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran tersebut sebanyak 67 (89,33%) mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$ dan hanya 8 (delapan) indikator sasaran (10,67%) yang nilai capaiannya kurang optimal $< 85,00\%$. yaitu:

1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah nilai capaian rata-rata 68,69. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan capaian pada rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang SLTP target 1:182 realisasi 1:338 nilai capaian 19,78%. Rendahnya capaian indikator kinerja tersebut disebabkan sampai akhir tahun 2016, jumlah sekolah jenjang SLTP hanya sebanyak 29 sekolah sehingga terjadi konsentrasi jumlah murid yang sangat besar pada sekolah tertentu. Upaya yang akan dilakukan kedepan adalah memfasilitasi penambahan sekolah pada jenjang SLTP sesuai kebutuhan jumlah siswa.
2. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk nilai capaian 70,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan keterbatasan jumlah Dokter Gigi di Kota Ternate yaitu hanya 12 orang karena Kebijakan Moratorium PNS solusinya kedepan adalah mengangkat Dokter PTT Daerah dan PTT Pusat.
3. Rasio bidan per 100.000 penduduk nilai capaian 82,00%. Rendahnya nilai capaiannya tersebut disebabkan keterbatasan jumlah Bidan PNS karena Kebijakan Moratorium PNS solusinya kedepan adalah mengangkat Bidan PTT Daerah dan PTT Pusat.
4. Rasio Posyandu terhadap balita nilai capaian 72,29%. Rendahnya nilai capaian tersebut karena pembentukan satu Posyandu harus memenuhi persyaratan dan sasaran sekaligus mengalami kesulitan membuat posyandu karena tidak konstannya jumlah sasaran disetiap RT/RW/Kelurahan dan kesediaan menjadi kader Posyandu juga berpengaruh terhadap pembentukan Posyandu. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian

indikator tersebut kedepan, yaitu melalui : pembentukan postimbang di setiap RW/RT dan rekrutan kader postimbang untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita serta ibu hamil dan upaya proaktif kader posyandu/postimbang menjemput di rumah-rumah sasaran anak balita agar datang ke posyandu/postimbang.

5. Persentasekecamatan bebas rawan gizi nilai capaian 71,42% Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih terdapat Kecamatan yang masih rawan status gizi buruk dan kurang di atas 15,00% .Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan pendampingan posyandu, pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak serta pendampingan balita gizi buruk dan gizi kurang melalui pendekatan Konseling Keluarga.
6. PNS yang memperoleh penghargaan dengan nilai capaian 63,74%. Rendahnya capaian indikator tersebut disebabkan sebagian pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Ternate tidak mengusulkan PNS yang telah memenuhi syarat memperoleh penghargaan, sehingga dari target 171 orang hanya sebanyak 109 orang yang memperoleh penghargaan. Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk mengoptimalkan capaian indikator tersebut, yaitu melakukan koordinasi dengan Pimpinan SKPD dalam pengusulan PNS yang akan memperoleh penghargaan.
7. Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan nilai capaian 83,78%. Target indikator jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan tahun 2016 sejumlah 37 kelompok, realisasinya 31 kelompok sehingga nilai capaiannya 83,78%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya kenaikan harga beberapa barang/peralatan yang merupakan item utama bantuan sehingga berpengaruh pada pengurangan jumlah kelompok target penerima bantuan. Untuk mengoptimalkan capaian indikator tersebut kedepan akan dilakukan perbaikan perencanaan pada perhitungan fluktuasi harga barang sehingga tidak terjadi kesalahan prediksi harga yang berlaku dipasaran.
8. Rasio bayi berakte kelahiran nilai capaiannya 62,75%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya akte kelahiran sehingga berdampak pada kurang paham dan kurang perdulinya orang tua untuk segera mengurus akte kelahiran anak sejak lahir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepan akan dilakukan sosialisasi secara optimal dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam memberikan informasi dan pelayanan akte kelahiran.

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2016, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA



WALIKOTA TERNATE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TERNATE

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 01 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE



Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1 Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12,60 %
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100,00 %
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	75,00 %
2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	82,00 %
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00 %
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata	
	- Nilai UN rata-rata SD	6,00
	- Nilai UAS rata-rata SD	7,50
	- Nilai UN rata-rata SLTP	6,00
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8,00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	6,00
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8,00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5,00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6,50
	- Nilai UN rata-rata paket C	5,00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7,00
	4 Angka kelulusan	
	- SD	100,00 %
	- SLTP	100,00 %
	- SLTA	100,00 %
	5 Angka putus sekolah	
	- SD	0,06 %
	- SLTP	0,07 %
	- SLTA	0,09 %
	6 Angka rata-rata lama sekolah	
	- SD	6 Tahun
	- SLTP	3 Tahun
	- SLTA	3 Tahun
	7 Angka partisipasi murni	
	- SD	92,00 %
	- SLTP	75,00 %
	- SLTA	75,00 %
	8 Angka partisipasi kasar	
	- SD	99,21 %
	- SLTP	75,00 %
	- SLTA	72,50 %
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	
	- SD	1 : 175 %
	- SLTP	1 : 182 %
	- SLTA	1 : 275 %

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 30
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 29
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 18
	14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 15
	15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 15
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	71 Tahun
	2 Angka prevalensi penyakit	
	- Malaria	< 10 ‰
	- TBC	225/100.000 Pddk
	- DBD	3 ‰
	- HIV	0,5/1.000 Pddk
	3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)	
	- Karena penyakit Malaria	< 5 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit HIV	< 5 per 100.000 Pddk
	4 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	65,00 %
	5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH
	6 Angka kematian balita	5/1.000 KH
	7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000 KH
	8 Persentase balita gizi buruk	2,00 %
	9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk
	10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk
	11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : 100.000 Pddk
	12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk
	13 Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60 Balita
	14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk
	16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %
	17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100,00 %
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90,00 %

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk - <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) - <i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	20,00 ‰ < 10 ‰
	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50,00 ‰
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	20,00 ‰
	3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00 ‰
	4 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	20,00 ‰
	5 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan	51,61 ‰ 14,45 ‰ 17,97 ‰
	6 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00 ‰
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	7 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK
	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	5 lokasi
	2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	73,05 ‰
6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40,36 ‰
	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	2,92 ‰
	2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0,08 ‰
	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100,00 ‰
7 Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45,00 ‰
	1 Nilai modal kerja dan investasi UKM	1.018.469.557.942,00 Rp
	2 Nilai omzet UKM	2.690.568.153.097,00 Rp
	3 Jumlah kelompok tani yang memperoleh	37 Klp.
	4 Tingkat pengangguran terbuka	6,50 ‰
	5 Pendapatan perkapita	33.534.337,00 Rp
	6 Laju pertumbuhan ekonomi	8,10 ‰
7 Tingkat Inflasi	4,51 ‰	
8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	100,00 ‰
	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	35 Jenis
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	12 Tempat

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
	4 Rasio penduduk ber-KTP 5 Rasio penduduk ber-KK 6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:0,8 1:0,9 1:0,7
9 Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan 2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	71 Klp. 30 Klp.
10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran 2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina 3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama 4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan 5 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate 6 Persentase situs budaya yang dilestarikan	100,00 % 100 TPQ 2 Kali 43 Orang 100,00 % 40,00 %
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan 2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan 3 Persentase jumlah kasus pelanggaranPerda yang dapat ditangani	8 Perda 100,00 % 100,00 %

PROGRAM	ANGGARAN
1 Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	2.452.121.460,00
2 Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	22.705.488.055,00
3 Prog. Pendidikan Menengah	4.015.907.505,00
4 Prog. Pendidikan Non Formal	352.580.490,00
5 Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.097.933.310,00
6 Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.413.792.630,00
7 Prog. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar	1.768.751.110,00
8 Prog. Pendidikan Non Formal	342.587.391,00
9 Prog. Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.803.435.000,00
10 Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat	2.067.272.000,00
11 Prog. Pengawasan Obat dan Makanan	174.472.000,00
12 Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	215.455.000,00
13 Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat	255.040.700,00
14 Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat	349.450.000,00
15 Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.129.526.800,00
16 Prog. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	197.240.000,00
17 Prog. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	8.146.510.000,00
18 Prog. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	224.800.000,00
19 Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	467.183.060,00
20 Prog. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1.894.131.000,00
21 Prog. Pembangunan Jalan dan Jembatan	31.845.128.342,00
22 Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.849.542.300,00
23 Prog. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	36.184.341.600,00
24 Prog. Pembangunan turap/ talud /bronjong	4.672.927.927,00
25 Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.849.542.300,00
26 Prog. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	12.240.549.919,00
27 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.722.369.968,00
28 Prog. Pengendalian Banjir	1.297.730.230,00
29 Prog. Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.004.896.200,00
30 Prog. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	1.515.474.288,00
31 Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan	149.997.730,00
32 Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate	82.125.991,00
33 Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	149.999.860,00
34 Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate	149.930.300,00
35 Penyusunan Mongrafi Kota Ternate	99.956.080,00
36 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.784.566.583,00
37 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	259.038.090,00
38 Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	854.143.240,00
39 Prog. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	412.976.330,00
40 Prog. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	116.792.800,00
41 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	306.813.400,00
42 Prog. Penataan Administrasi Kependudukan	1.063.692.147,00
43 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	78.744.340,00
44 Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS	600.948.800,00
45 Prog. Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	229.820.000,00
46 Prog. Pembinaan Anak terlantar	58.280.000,00
47 Prog. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	155.220.000,00
48 Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	667.095.215,00
49 Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	305.285.166,00

PROGRAM	ANGGARAN
50 Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	293.139.764,00
51 Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	321.251.891,00
52 Prog. Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	284.263.790,00
53 prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	605.375.000,00
54 Prog. Pngelolaan Kekayaan Budaya	522.050.000,00
55 Prog. Amenitas Pariwisata	850.000.000,00
56 Prog. Peningkatan Peras Serta Kepemudaan	1.302.438.657,00
57 Prog. Sarana dan Prasarana kepemudaan	1.722.100.000,00
58 Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pemcegahan Tindak Kriminal	376.152.500,00
59 Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	128.762.500,00
60 Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahannTindak Kriminal	81.682.590,00
61 Prog. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	359.346.570,00
62 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	431.999.960,00
63 Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	44.554.025,00
64 Prog.Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1.506.883.682,00
65 Prog. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	456.693.137,00
66 Prog. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan	4.352.418.659,00
67 Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	577.960.395,00
68 Belanja Bantuan Sosial	5.400.500.000,00
69 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT)	1.257.945.000,00
70 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)	157.480.000,00
71 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	587.054.000,00
72 Prog. Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.453.821.825,00
73 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Kota Ternate Utara	500.000.000,00
74 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Kota Ternate Tengah	71.061.000,00
75 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Kota Ternate Selatan	575.999.990,00
76 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Pulau Ternate	500.000.000,00
77 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Pulau Moti	250.000.000,00
78 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Pulau Batang Dua	300.000.000,00
79 Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan Pulau Hiri	259.974.950,00
80 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Utara	114.977.900,00
81 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate	600.000.000,00
82 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Selatan	117.901.340,00
83 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Ternate	79.736.240,00
84 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Moti	93.190.295,00
85 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Batang Dua	80.000.000,00
86 Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Hiri	69.999.770,00
87 Prog. Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Aparatur	922.317.005,00
88 Prog.Pendidikan Kedinasan	339.620.000,00
89 Prog.Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.521.871.259,00
90 Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	536.064.285,00
91 Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	13.109.047.430,00
92 Prog. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	474.335.500,00
93 Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	108.973.500,00
94 Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	592.425.349,00
95 Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	803.000.000,00
96 Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Kehutanan	1.182.302.000,00
97 Prog. Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	44.373.500,00
98 Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	161.981.000,00
99 Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	263.830.000,00
100 Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani	222.891.000,00
101 Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	44.510.000,00

PROGRAM	ANGGARAN
102 Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	629.883.000,00
103 Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	52.665.000,00
104 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir	719.850.160,00
105 Prog. Pengembangan Budidaya Perikanan	55.200.000,00
106 Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap	7.107.016.960,00
107 Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	532.252.160,00
108 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	39.990.650,00
109 Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	96.600.000,00
110 Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	198.500.000,00
111 Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	308.170.000,00
112 Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	235.290.000,00
113 Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	38.948.000,00
114 Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.814.920.000,00
115 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	20.000.000,00



Ternate, 1 Maret 2016
WALIKOTA TERNATE

[Handwritten Signature]
Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

LAMPIRAN
PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

**Pemerintah Kota Ternate
Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1 Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	12,60 %	11,56 %	91,75
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100,00 %	100,00 %	100,00
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	75,00 %	75,00 %	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Pertama				97,25
2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	82,00 %	85,00 %	103,66
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata			
	- Nilai UN rata-rata SD	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata SD	7,50	7,50	100,00
	- Nilai UN rata-rata SLTP	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	6,00	6,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5,00	6,00	120,00
- Nilai UAS rata-rata paket B	6,50	7,00	107,69	
- Nilai UN rata-rata paket C	5,00	6,00	120,00	
- Nilai UAS rata-rata paket C	7,00	8,00	114,29	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	4 Angka kelulusan			
	- SD	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTP	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTA	100,00 %	100,00 %	100,00
	5 Angka putus sekolah			
	- SD	0,06 %	0,07 %	83,33
	- SLTP	0,07 %	0,06 %	114,29
	- SLTA	0,09 %	0,08 %	111,11
	6 Angka rata-rata lama sekolah			
	- SD	6 Tahun	6 Tahun	100,00
	- SLTP	3 Tahun	3 Tahun	100,00
	- SLTA	3 Tahun	3 Tahun	100,00
	7 Angka partisipasi murni			
	- SD	92,00 %	82,22 %	89,37
	- SLTP	75,00 %	78,36 %	104,48
	- SLTA	75,00 %	73,49 %	97,99
	8 Angka partisipasi kasar			
	- SD	99,21 %	95,43 %	96,19
	- SLTP	75,00 %	87,66 %	116,88
	- SLTA	72,50 %	80,43 %	110,94
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
	- SD	1 : 175	1 : 192	90,29
	- SLTP	1 : 182	1 : 338	19,78
	- SLTA	1 : 275	1 : 286	96,00
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 30	1 : 26	113,33
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 29	1 : 25	113,79
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32	1 : 22,5	129,69
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 18	1 : 16	111,11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 15	1 : 12	120,00
	15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 15	1 : 11	126,67
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kedua				103,08
3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	71 Tahun	70 Tahun	98,59
	2 Angka prevalensi penyakit			
	- Malaria	<10 ‰	5,2 ‰	147,47
	- TBC	225/100.000 Pddk	219/100.000 Pddk	102,67
	- DBD	3 ‰	0,6 ‰	180,00
	- HIV	0,5/1.000 Pddk	0,03/1.000 Pddk	194,00
	3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)			
	- Karena penyakit Malaria	< 5 per 100.000 Pddk	0 per 100.000 Pddk	200,00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	1,6 per 100.000 Pddk	115,79
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	3,4 per 100.000 Pddk	55,88
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	1 per 100.000 Pddk	179,59
	4 Angka kesembuhan penderita TB paru	65,00 %	56,00 %	86,15
	5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	5,8/1.000 KH	117,14
6 Angka kematian balita	5/1.000 KH	1,93/1.000 KH	161,40	
7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140/100.000 KH	122/100.000 KH	112,86	
8 Persentase balita gizi buruk	2,00 %	0,6 %	170,00	
9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk	16 : 100.000 Pddk	94,12	
10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk	7 : 100.000 Pddk	70,00	
11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : 100.000 Pddk	123 : 100.000 Pddk	82,00	
12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk	231 : 100.000 Pddk	98,30	
13 Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60 Balita	1 : 83 Balita	72,29	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk	1 : 21.802 Pddk	137,60
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk	1 : 15.573 Pddk	96,32
	16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %	71,42 %	71,42
	17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100,00 %	100,00 %	100,00
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90,00 %	90,00 %	100,00
	20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk			
	- Annual Malaria Incidence (AMI)	20,00 ‰	40,00 ‰	47,50
	- Annual Parasite Incidence (API)	< 10 ‰	5,20 ‰	148,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Ketiga				116,26
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	50,00 %	50,13 %	100,25
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	20,00 %	19,99 %	99,93
	3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00 %	99,00 %	99,00
	4 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	20,00 %	17,81 %	89,05
	5 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan			
	- MCK Komunal	51,61 %	51,61 %	100,00
	- Drainase /gorong-gorong	14,45 %	14,44 %	99,93
	- Jalan lingkungan	17,97 %	17,82 %	99,17
6 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00 %	100,00 %	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	7 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Keempat				98,59
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	5 lokasi	5 lokasi	100,00
	2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	73,05 %	73,05 %	100,00
	3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	40,36 %	40,36 %	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kelima				100,00
6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	2,92 %	1,86 %	63,74
	2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0,08 %	- %	100,00
	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00
	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	45,00 %	39,63 %	88,07
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Keenam				87,95
7 Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1 Nilai modal kerja dan investasi UKM	1.018.469.557.942,00 Rp	935.456.416.220,00 Rp	91,85
	2 Nilai omzet UKM	2.690.568.153.097,00 Rp	2.549.299.048.270,00 Rp	94,75
	3 Jumlah kelompok tani yang	37 Klp.	31 Klp.	83,78
	4 Tingkat pengangguran terbuka	6,50 %	- -	-
	5 Pendapatan perkapita	33.534.337,00 Rp	35.151.093,00 Rp	104,82
	6 Laju pertumbuhan ekonomi	8,10 %	8,12 %	100,25
	7 Tingkat Inflasi	4,51 %	1,91 %	157,65
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Ketujuh				105,52

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Persentase SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	100,00 %	100,00 %	100,00
	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	35 Jenis	32 Jenis	91,43
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	12 Tempat	11 Tempat	91,67
	4 Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8	1 : 0,78	97,44
	5 Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,9	1 : 0,88	97,73
	6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1 : 0,7	1 : 0,51	62,75
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kedelapan				90,17
9 Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	71 Klp.	70 Klp.	98,59
	2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	30 Klp.	58 Klp.	193,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kesembilan				145,96
10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100,00 %	100,00 %	100,00
	2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	100 TPQ	183 TPQ	183,00
	3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100,00
	4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	43 Orang	21 Orang	151,17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	5 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100,00 %	88,99 %	88,99
	6 Persentase situs budaya yang dilestarikan	40,00 %	34,48 %	86,20
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kesepuluh				118,23
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda	8 Perda	100,00
	2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00
	3 Persentase jumlah kasus pelanggaranPerda yang dapat ditangani	100,00 %	100,00 %	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Kesebelas				100,00
Rata-Rata Total Capaian Sasaran Strategis				105,73

Jumlah Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2016 Yang Di Ukur Rp. 263.535.884.423,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2016 Yang Di Ukur Rp. 232.682.014.221,08

2016

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE

